

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 589/DJPSDKP2/TU.140/VII/2026

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 18 Juli 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Direktorat PSP), bersama ini kami laporkan hasil capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PSP berjalan sesuai rencana dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,18% dan kategori baik, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Adapun indikator yang diukur meliputi:
 - a. Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas memperoleh capaian sebesar 91,43 dari target sebesar 83 (110,16%);
 - b. Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 51,45 dari target sebesar 30 (120%);
 - c. Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 81 dari target sebesar 81 (100%);
 - d. Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 25 dari target sebesar 25 (100%);
 - e. Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 100 dari target sebesar 100 (100%);
 - f. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks) memperoleh capaian sebesar 88,39 dari target sebesar 81,5 (108,45%);
 - g. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSP memperoleh capaian sebesar 100 dari target sebesar 100 (100%);
 - h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memperoleh capaian sebesar 100 dari target sebesar 86 (116,28%).
3. Berkenaan hal tersebut, kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat PSP Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sunaryo

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Para Direktur lingkup Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2026
KABUPATEN

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS
UNTUK

LAPORAN KINERJA

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan



Triwulan II
Tahun 2026

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar dan Sandi Negara



BerAKHLAK

Berprestasi Polapanan Akiintabal Kompetan
Harmonis Loyal Addghti Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

LKj Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. PSDKP selama tahun anggaran berjalan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Hasil pencapaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 merupakan hasil dari kerjasama dan kerja keras semua pihak sejak perumusan kebijakan, implementasi hingga monitoring. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sinergi dan kerjasamanya, semoga di periode selanjutnya tetap dapat mempertahankan sinergi dan kerjasama yang lebih baik.

Jakarta, 18 Juli 2026

Hormat Kami,

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sunaryo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) pada Triwulan II Tahun 2026 mencatat capaian kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,18% (baik), baik pada tahap pelaporan awal maupun setelah verifikasi. Konsistensi nilai ini menegaskan bahwa proses pengukuran dan pelaporan kinerja telah berjalan akurat, kredibel, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Capaian NKO sebesar 108,18% terdiri dari 8 indikator kinerja pada Direktorat PSP, yaitu:

- a. Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas memperoleh capaian sebesar 91,43 dari target sebesar 83 (110,16%);
- b. Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 51,45 dari target sebesar 30 (120%);
- c. Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 81 dari target sebesar 81 (100%);
- d. Nilai Kualitas rancangan standarisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 25 dari target sebesar 25 (100%);
- e. Nilai Kualitas rancangan standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP memperoleh capaian sebesar 100 dari target sebesar 100 (100%);
- f. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks) memperoleh capaian sebesar 88,39 dari target sebesar 81,5 (108,45%);
- g. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSP memperoleh capaian sebesar 100 dari target sebesar 100 (100%);
- h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan memperoleh capaian sebesar 100 dari target sebesar 86 (116,28%).



Capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) Triwulan II Tahun 2026 berada dalam kategori baik, didukung oleh penguatan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan tersebut dicapai melalui pelaksanaan supervisi pembinaan Pokmaswas, penerapan standar dan kriteria teknis sarana prasarana pengawasan SDKP, peningkatan kesiapan prasarana, penyusunan dokumen standardisasi, penguatan kompetensi ASN, penerapan manajemen risiko, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan koordinasi dan monitoring program secara berkala. Strategi tersebut mampu mendorong pencapaian seluruh indikator kinerja utama sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai progres kegiatan. Penurunan persentase realisasi dibandingkan periode sebelumnya disebabkan oleh penambahan pagu anggaran melalui kegiatan *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS) yang bersifat multiyears, sehingga memengaruhi proporsi realisasi terhadap total pagu.

Pada Triwulan berikutnya, Direktorat PSP akan meningkatkan pengendalian program dan anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala, mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis khususnya MFISS, menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu, memperkuat koordinasi dengan unit kerja dan pemangku kepentingan, mengoptimalkan penerapan manajemen risiko, serta mempercepat penyusunan dan implementasi standar teknis sarana dan prasarana pengawasan. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun 2026.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
1. BAB 1 PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	6
2. BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan	8
2.2. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	10
2.3. Isu Dalam Pelaksanaan Tugas Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	11
2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026	13
2.5. Pengukuran Kinerja	15
3. BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
3.3. Efisiensi Sumber Daya	112
3.4. Akuntabilitas keuangan.....	113
4. BAB 4 PENUTUP.....	115
4.2. Kesimpulan.....	116
4.3. Saran.....	117
4.4. Rekomendasi	117



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	13
Tabel 3.1. Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Tahun 2026	17
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	23
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	23
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	24
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	24
Tabel 3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	27
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	28
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	29
Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	29
Tabel 3.11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.12. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	31
Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	33
Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	34
Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	34



Tabel 3.39.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	57
Tabel 3.40.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	57
Tabel 3.41.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	59
Tabel 3.42.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja.....	60
Tabel 3.43.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	61
Tabel 3.44.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	62
Tabel 3.45.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	62
Tabel 3.46.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	63
Tabel 3.47.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	64
Tabel 3.48.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja.....	65
Tabel 3.49.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	66
Tabel 3.50.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	67
Tabel 3.51.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	67
Tabel 3.52.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	68
Tabel 3.53.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	69
Tabel 3.54.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja.....	70
Tabel 3.55.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	71
Tabel 3.56.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	72
Tabel 3.57.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	72
Tabel 3.58.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	73
Tabel 3.59.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
Tabel 3.60.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja.....	75



Tabel 3.61.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	76
Tabel 3.62.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	77
Tabel 3.63.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	78
Tabel 3.64.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	78
Tabel 3.65.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	80
Tabel 3.66.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	82
Tabel 3.67.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	83
Tabel 3.68.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	84
Tabel 3.69.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	84
Tabel 3.70.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	86
Tabel 3.71.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	88
Tabel 3.72.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	88
Tabel 3.73.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	89
Tabel 3.74.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	89
Tabel 3.75.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	91
Tabel 3.76.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	94
Tabel 3.77.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	94
Tabel 3.78.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)	95
Tabel 3.79.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark	95
Tabel 3.80.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	97
Tabel 3.81.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	99



Tabel 3.82.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	99
Tabel 3.83.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	100
Tabel 3.84.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	100
Tabel 3.85.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	102
Tabel 3.86.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	104
Tabel 3.87.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	104
Tabel 3.88.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	105
Tabel 3.89.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	105
Tabel 3.90.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	106
Tabel 3.91.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026	108
Tabel 3.92.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya	108
Tabel 3.93.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra).....	109
Tabel 3.94.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark.....	109
Tabel 3.95.	Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja	111



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.....	5
Gambar 3.1. Realisasi Anggaran Dit. PSP s.d TW II Tahun 2026	21
Gambar 3.2. Pembinaan Pokmaswas TW II	26
Gambar 3.3. Kegiatan Pengendalian MFISS TW II.....	36



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

01. Pendahuluan

Laporan Kinerja
Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan

Triwulan II Tahun 2026



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar Nasional



BerAKHLAK
Berprestasi Polakan Aklatol Kompaten
Harmonis Loyal Addghti Kolabonatif

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan memiliki peran strategis dalam penyediaan, pengelolaan, serta pengembangan prasarana dan sarana pengawasan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pengawasan, khususnya dalam menghadapi dinamika tantangan pengelolaan sumber daya kelautan yang semakin kompleks.

Pada Tahun Anggaran 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan melaksanakan berbagai program prioritas yang berorientasi pada penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan sarana prasarana, serta percepatan penyediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset pengawasan. Program tersebut antara lain mencakup pengembangan sistem *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS) melalui aplikasi pengendalian berbasis *realtime*, penyusunan sistem informasi rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengawasan, percepatan pemanfaatan dan hibah lahan, serta penyempurnaan desain dan rekondisi kapal pengawas.

Selain itu, pada Triwulan II Tahun 2026 juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung seperti penyusunan standar operasional prosedur (SOP) rencana induk pengembangan, reviu standar teknis prasarana dan sarana pengawasan, serta penilaian kesiapan prasarana pengawasan di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hasil penilaian menunjukkan tingkat kesiapan prasarana dengan indeks sebesar 81 yang berada pada kategori “siap”, namun tetap memerlukan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi.

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa persentase realisasi pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan menjadi 0,04%, dibandingkan dengan 29,34% pada bulan Mei 2026. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya penyerapan belanja, melainkan akibat penambahan pagu anggaran Program *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance*



System (MFISS) sebesar Rp1,110 triliun pada pertengahan tahun. Bertambahnya pagu anggaran menyebabkan persentase realisasi terhadap total anggaran menjadi lebih kecil karena anggaran tambahan tersebut belum terealisasi pada periode pelaporan. Dengan demikian, penurunan persentase realisasi lebih mencerminkan perubahan basis perhitungan (kenaikan pagu) daripada perlambatan pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran diproyeksikan akan meningkat pada semester II seiring dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan dan kontrak pengadaan dalam Program MFISS.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, serta sebagai media evaluasi terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Laporan kinerja ini disusun untuk menggambarkan capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang periode pelaporan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kontribusi Direktorat terhadap pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2026 yang menginformasikan capaian kinerja selama Triwulan II tahun 2026



1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2026, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;



- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, berdasarkan Surat Tugas Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Nomor B.1/DJPSPDKP.2/KP.440/IV/2026 tanggal 8 April 2026 maka struktur organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan terdiri dari enam Tim Kerja sebagai berikut:

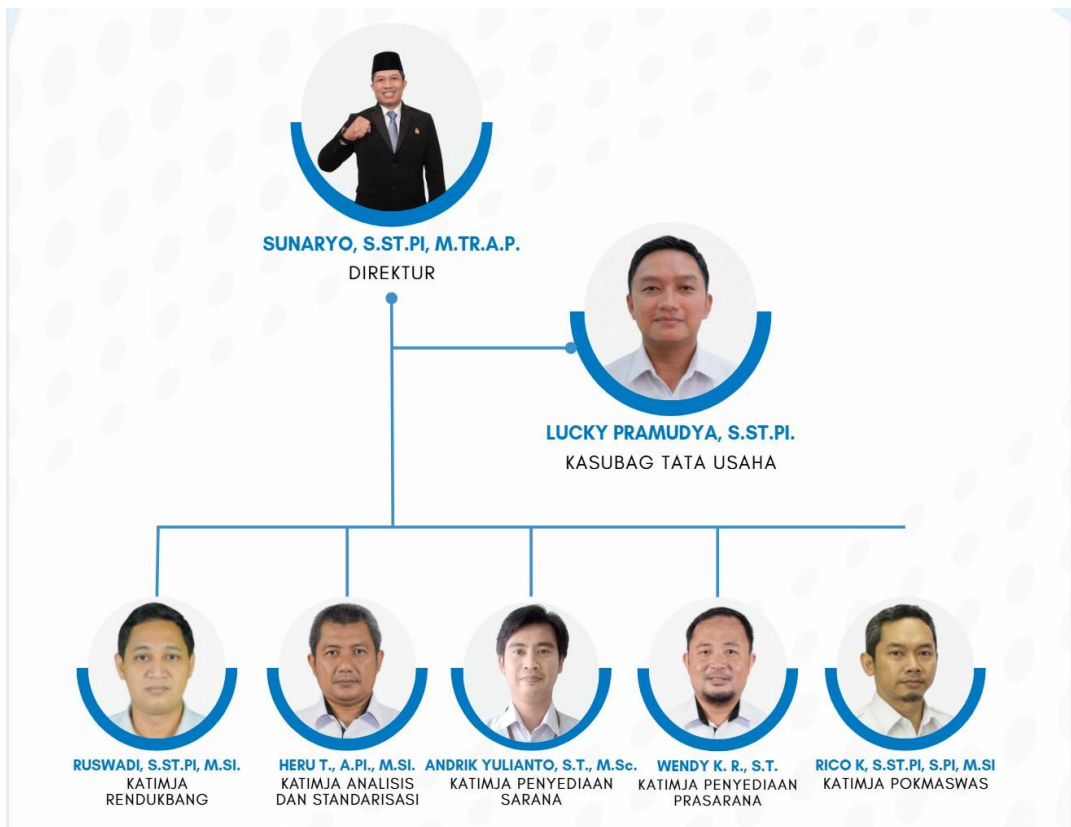
1. Tim Kerja Perencanaan Induk Pengembangan
2. Tim Kerja Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis
3. Tim Kerja Penyediaan Prasarana Pengawasan
4. Tim Kerja Penyediaan Sarana Pengawasan



5. Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
6. Subbagian Tata Usaha

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN



Gambar 1.1. Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2026 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

	Pendahuluan
BAB I	Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.
	Perencanaan Kinerja
Bab II	Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan tahun 2026.
	Akuntabilitas Kinerja
Bab III	Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan tahun 2026.
	Penutup
Bab IV	Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2026 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

02. Perencanaan Kinerja

Laporan Kinerja
Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan

Triwulan II Tahun 2026



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK
Berprestasi Politanan Aklintabal Komptan
Harmonis Laval Addgtti Kolabonatif

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai *Main System* Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.



3. *Market Driven Oriented*

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (*Smart Surveillance System*).

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029, yang merupakan dokumen acuan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan untuk periode dimaksud yang bersifat indikatif dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan berlaku. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP. KKP telah memulai proses transformasi pembangunan kelautan dan perikanan sejak periode tahun 2020-2024 melalui arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru.

Arah kebijakan KKP di tahun 2026 semakin diperkuat dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang menekankan pada beberapa aspek strategis, yaitu: 1) Memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan BBL yang merugikan ekosistem dan perekonomian nasional; 2) Memperkuat patroli dan pengawasan terhadap kapal-kapal asing maupun domestik yang melakukan penangkapan ikan ilegal; 3) Memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan guna mencegah eksploitasi yang tidak terkendali; 4) Mengoptimalkan skema penangkapan ikan berbasis kuota guna menjaga keberlanjutan stok ikan nasional untuk memastikan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam sektor perikanan.



2.2. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 86/KEP.DJ-PSDKP/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

dengan misi:

- a. Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis
- b. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud

adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- a. Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan dengan indikator sasaran strategis “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator sasaran strategis “Indeks Reformasi Birokrasi KKP”

2.3. Isu Dalam Pelaksanaan Tugas Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. Pengembangan prasarana dan sarana pengawasan merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu mendapatkan perhatian lintas unit kerja. Isu-isu tersebut antara lain:



1. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pengawasan yang belum merata

- a. Masih terdapat ketimpangan ketersediaan dan kondisi fisik sarana-prasarana pengawasan antar wilayah.
- b. Sebagian UPT belum memiliki dermaga, pos pengawasan, atau gudang logistik yang memadai, khususnya di wilayah rawan pelanggaran (border area, WPP 718, dan wilayah timur Indonesia).

2. Kesiapan Teknis dan Spesifikasi Sarana Tidak Seragam

- a. Tidak semua kapal, *drone*, kendaraan, atau perangkat komunikasi memiliki spesifikasi teknis yang seragam atau memenuhi kebutuhan operasional terkini.
- b. Terjadi kendala dalam integrasi sistem komunikasi, radar, dan navigasi antar armada atau antara kapal dengan *command center*.

3. Keterlambatan Pengadaan dan Perawatan

- a. Proses pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sering mengalami keterlambatan, baik dari sisi perencanaan teknis (DED, spek) maupun proses administrasi (lelang, kontrak).
- b. Mekanisme perawatan rutin dan *life cycle management* untuk kapal dan alat pengawasan belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan *downtime* alat yang tinggi.

4. Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Kebutuhan (*Needs Assessment*)

- a. Perencanaan pengadaan dan pembangunan prasarana belum sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan aktual unit kerja di lapangan.
- b. Kegiatan survei kebutuhan kadang tidak terintegrasi dengan penganggaran, sehingga menghasilkan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional.

5. Ketergantungan pada Skema Pembiayaan Luar Negeri

- a. Pengembangan infrastruktur pengawasan sangat bergantung pada pembiayaan jangka panjang (PHLN), yang memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam pengadaan dan proses evaluasinya.



- b. Risiko keterlambatan atau revisi dari lembaga pendonor juga memengaruhi keberlanjutan pengembangan sistem pengawasan terpadu.

2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026 sebagai dokumen kinerja menetapkan target kinerja tahun 2026 beserta anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam perjalanannya pada tahun 2026. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2026
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan	ISK1.1.1 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	83
	Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.2 Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1 Persentase penyelesaian dan kesesuaian implementasi standar sarana pengawasan SDKP	60
		ISK2.1.2 Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60
		ISK2.1.3 Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	81
		ISK2.1.4 Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	40
		ISK2.1.5 Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	40
		ISK2.1.6 Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	100



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2026
		ISK2.1.7 Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	100
		ISK2.1.8 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana (%)	100
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK3.1.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81,5
		ISK3.1.2 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	88,2
		ISK3.1.3 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Dit. PSP (%)	100
		ISK3.1.4 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86
		ISK3.1.5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)	81
		ISK3.1.6 Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)	78
		ISK3.1.7 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71



2.5. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen implementasi SAKIP dilaksanakan dengan klarifikasi data kinerja yang telah dicapai atas target yang telah ditetapkan, pembahasan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, disertai dengan verifikasi dan reviu data kinerja. Penghitungan capaian kinerja berdasarkan informasi indikator kinerja. Penghitungan kinerja dilaksanakan secara berkala bagi indikator kinerja yang telah ditetapkan target interim. Untuk target yang ditetapkan dalam satu tahun maka penghitungan kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Untuk unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Ditjen PSDKP dan satker lingkup Ditjen PSDKP serta Dekonsentrasi, hasil penghitungan capaian kinerja di input kedalam Sistem Aplikasi Pengelolaan kinerja (SAPK) KKP melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Hasil penghitungan capaian kinerja dituangkan ke dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan merujuk PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

03. Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja
Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan

Triwulan II Tahun 2026



#PSPSIGAP



BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Ditjen PSDKP telah menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; Tata kelola pemerintahan yang efektif, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 17 indikator sasaran kegiatan. Pada Triwulan II tahun 2026, Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan sebesar 108,18%. Secara detail capaian indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	83	91,43	110,16%
		ISK1.1.2 Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100	(dilakukan pengukuran pada TW IV)	-
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1 Persentase penyelesaian dan kesesuaian implementasi standar sarana pengawasan SDKP	30	51,45	120%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
		ISK2.1.2 Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60	(dilakukan pengukuran pada TW IV))	-
		ISK2.1.3 Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	81	81	100%
		ISK2.1.4 Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	40	(dilakukan pengukuran pada TW IV)	-
		ISK2.1.5 Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	40	(dilakukan pengukuran pada TW IV))	-
		ISK2.1.6 Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	25	25	100%
		ISK2.1.7 Nilai Kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	100	100	100%
		ISK2.1.8 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana (%)	100	pengukuran pada TW IV)	-



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
Program: Dukungan Manajemen					
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK3.1.1 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81,5	88,39	108,45%
		ISK3.1.2 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat PSP (nilai)	88,2	(dilakukan pengukuran pada TW IV)	-
		ISK3.1.3 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Dit. PSP (%)	100	100	100%
		ISK3.1.4 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86	100	116,28%
		ISK3.1.5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)	81	(dilakukan pengukuran pada TW IV)	-
		ISK3.1.6 Nilai inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)	78	(dilakukan pengukuran pada TW IV)	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian TW II
		ISK3.1.7 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71	(dilakukan pengukuran pada TW IV)	-

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Aksi dan Rincian Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator, baik yang bersifat tahunan maupun semesteran.

Sampai dengan Semester I (Juni 2026), hasil pengukuran menunjukkan bahwa Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,18%, yang mengindikasikan bahwa kinerja organisasi secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh keberhasilan beberapa indikator kinerja utama yang memperoleh nilai di atas target, antara lain Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas dengan capaian 110,16%, Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP sebesar 120%, Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP sebesar 100%, serta Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko yang mencapai 116,28%.

Beberapa indikator lainnya masih menunjukkan realisasi 0% pada Semester I bukan karena tidak terlaksana, melainkan karena target pencapaiannya direncanakan pada Semester II atau masih dalam proses penyelesaian sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut merupakan bagian dari tahapan implementasi program dan akan terus dimonitor melalui evaluasi kinerja berkala agar seluruh target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran capaian kinerja Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan telah berjalan secara efektif dan berada pada jalur yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Hasil pengukuran ini juga



menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap faktor pendukung maupun penghambat, penyempurnaan strategi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada Semester II Tahun 2026. Dengan demikian, proses pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa persentase realisasi pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan menjadi 0,04%, dibandingkan dengan 29,34% pada bulan Mei 2026. Penurunan tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya penyerapan belanja, melainkan akibat penambahan pagu anggaran Program Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS) sebesar Rp1,110 triliun pada pertengahan tahun seperti pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Realiasasi Anggaran Dit. PSP s.d TW II Tahun 2026

Penambahan pagu tersebut secara langsung meningkatkan total anggaran yang menjadi dasar perhitungan persentase realisasi. Sementara itu, anggaran tambahan MFISS belum dapat direalisasikan pada periode pelaporan karena masih memerlukan tahapan administrasi dan pelaksanaan, seperti penyesuaian dokumen anggaran, proses pengadaan, serta pelaksanaan kontrak. Akibatnya, meskipun nilai realisasi belanja tidak mengalami penurunan, persentase realisasi terhadap total pagu menjadi jauh lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya.

Dengan demikian, penurunan persentase realisasi pada bulan Juni lebih mencerminkan perubahan basis perhitungan akibat kenaikan pagu anggaran daripada perlambatan pelaksanaan kegiatan atau menurunnya kinerja penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan capaian kinerja pelaksanaan anggaran Triwulan II Tahun 2026 perlu mempertimbangkan adanya penambahan pagu MFISS yang signifikan, sehingga penurunan persentase realisasi tidak secara langsung diartikan sebagai penurunan kinerja organisasi.

Realisasi anggaran diproyeksikan akan meningkat pada Semester II Tahun 2026 seiring dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan dan kontrak pengadaan dalam Program MFISS, sehingga persentase realisasi diharapkan kembali meningkat sejalan dengan progres implementasi program.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP sepanjang Triwulan II tahun 2026 dituangkan dalam sebelas indikator sasaran kinerja. Secara lebih detail dijabarkan progres kinerja atas indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP sebagai berikut:

1. ISK 1.1.1 Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas (Indeks)

Indikator Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas merupakan ukuran tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan supervisi dalam rangka pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil supervisi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	83	91,43	-	-	83	-

Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas berhasil mencapai nilai 91,43 atau 110,16% dari target sebesar 83. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi pembinaan Pokmaswas berjalan efektif melalui peningkatan kualitas pendampingan, monitoring lapangan, evaluasi pembinaan, dan koordinasi dengan UPT PSDKP.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	83	91,43	110,16%

Direktorat PSP merupakan unit kerja yang relatif baru sehingga data historis lima tahun belum tersedia secara lengkap. Dibandingkan Tahun 2025, kualitas supervisi mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai indeks pembinaan Pokmaswas. Hal ini menunjukkan semakin baiknya efektivitas pelaksanaan pembinaan masyarakat pengawas.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
83	91,43	110,16%

Realisasi telah melampaui target tahunan dalam Renstra sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target akhir periode Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan Pokmaswas berjalan sesuai arah pembangunan pengawasan SDKP.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	83,00
Realisasi	91,43

Realisasi berada di atas benchmark organisasi sehingga kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas telah memenuhi bahkan melampaui standar kinerja yang ditetapkan

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

- 1) Supervisi berkala: Meningkatkan efektivitas pembinaan, kapasitas Pokmaswas, dan kualitas pengawasan SDKP di 14 UPT.
- 2) Pembinaan langsung: Meningkatkan kompetensi Pokmaswas serta mengidentifikasi kebutuhan dan kendala di lapangan.

- 3) Monitoring UPT: Monitoring dan evaluasi rutin memastikan pelaksanaan pembinaan berjalan efektif dan menjadi dasar perbaikan.
- 4) Koordinasi lintas unit: Sinergi antara Ditjen PSDKP, UPT, dan DKP memperkuat pembinaan serta menghindari tumpang tindih program.

Kendala

- 1) Keterbatasan sarana operasional: Fasilitas patroli, transportasi, dan anggaran masih terbatas sehingga pengawasan belum optimal.
- 2) Sebaran Pokmaswas sangat luas: Kondisi geografis menyulitkan pembinaan, monitoring, dan pendampingan secara merata.
- 3) Keterbatasan SDM pembina: Jumlah pembina belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya Pokmaswas.
- 4) Perbedaan kapasitas Pokmaswas: Tingkat kemampuan antar kelompok masih beragam sehingga membutuhkan pembinaan yang berbeda.

Upaya Perbaikan

- 1) Peningkatan pelaporan Pokmaswas: Menyederhanakan mekanisme pelaporan, memperkuat pembinaan, serta memberikan umpan balik dan apresiasi.
- 2) Digitalisasi monitoring: Mengoptimalkan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan.
- 3) Penyusunan pedoman terbaru: Memperbarui pedoman pembinaan agar lebih adaptif dan seragam.
- 4) Peningkatan kapasitas SDM: Meningkatkan kompetensi pembina dan anggota Pokmaswas melalui pelatihan.
- 5) Pendampingan berkala: Melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing Pokmaswas.





Gambar 3.2. Pembinaan Pokmaswas TW II

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program pendukung: Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Tabel 3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu	Rp76.241.000
Realisasi	Rp76.040.074
Serapan	99,74%

Dengan serapan anggaran sebesar 99,74%, indikator berhasil mencapai 110,16%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan Pokmaswas.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung pencapaian indikator:

- 1) Supervisi Pembinaan Pokmaswas
- 2) Monitoring UPT
- 3) Evaluasi Pokmaswas
- 4) Penyusunan rekomendasi pembinaan
- 5) Pendampingan teknis

Program tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembinaan Pokmaswas sehingga indikator berhasil melampaui target.

2. ISK 1.1.2 Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian penyusunan pedoman pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang menjadi tanggung jawab Direktorat PSP. Indikator ini mencerminkan capaian kinerja dalam menghasilkan rancangan pedoman pembinaan Pokmaswas secara utuh, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan meliputi penyusunan dokumen kajian teknis serta matriks rancangan perubahan pedoman pembinaan Pokmaswas. Tahap pelaksanaan mencakup proses pembahasan dan penyusunan draf pedoman pembinaan Pokmaswas melalui rapat dan forum koordinasi terkait. Selanjutnya, tahap pelaporan diwujudkan dalam penyusunan Nota Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas.

Perhitungan capaian indikator dilakukan dengan membandingkan nilai penyelesaian rancangan pedoman terhadap jumlah target rancangan pedoman yang ditetapkan dalam periode pelaporan. Target penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas ditetapkan sebanyak satu pedoman, sehingga capaian indikator menunjukkan persentase ketercapaian penyelesaian seluruh tahapan penyusunan pedoman sesuai bobot nilai masing-masing tahapan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	100	-

Indikator **Persentase Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas** belum menunjukkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 karena proses penyusunan pedoman masih berada pada tahap pengumpulan bahan, penyusunan substansi, koordinasi internal, dan harmonisasi dengan unit terkait. Sesuai rencana kerja tahunan, penyelesaian pedoman memang dijadwalkan pada Semester II sehingga belum terdapat output yang dapat dinilai sebagai capaian indikator pada periode pelaporan ini.

Meskipun realisasi indikator masih sebesar 0%, berbagai tahapan persiapan telah dilaksanakan sebagai dasar penyelesaian dokumen pada akhir tahun. Oleh karena itu, capaian yang belum terealisasi lebih disebabkan oleh tahapan proses pekerjaan (*time schedule*) daripada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	100	-	-

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan merupakan unit kerja yang relatif baru sehingga data historis lima tahun untuk indikator ini belum tersedia secara lengkap. Selain itu, indikator ini merupakan indikator yang berbasis penyelesaian dokumen (*milestone indicator*) sehingga capaian tidak bersifat linier setiap triwulan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyusunan Pedoman Pembinaan Pokmaswas pada Tahun 2026 dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih komprehensif melalui penyesuaian terhadap

perkembangan kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga memerlukan proses koordinasi dan harmonisasi yang lebih intensif.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
100	-	-

Dalam dokumen Renstra Direktorat PSP, penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas ditargetkan selesai pada Tahun 2026 sebagai salah satu instrumen penguatan tata kelola pembinaan masyarakat pengawas.

Sampai dengan Triwulan II, indikator belum mencapai target karena masih berada pada tahapan penyusunan. Namun demikian, kondisi tersebut masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga diproyeksikan dapat diselesaikan pada Semester II dan memenuhi target Renstra pada akhir tahun.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	100
Realisasi	-

Benchmark

Untuk indikator ini belum tersedia standar nasional yang secara khusus mengatur tingkat penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas. Oleh karena itu, benchmark yang digunakan adalah target internal Direktorat

PSP dan Ditjen PSDKP, yaitu penyelesaian dokumen sebesar **100%** pada akhir Tahun 2026.

Analisis

Karena indikator merupakan indikator keluaran (output) berupa dokumen kebijakan, maka penilaian dilakukan berdasarkan status penyelesaian dokumen. Pada Triwulan II, dokumen masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan benchmark akhir. Evaluasi pencapaian akan dilakukan setelah dokumen selesai dan ditetapkan.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

- 1) Komitmen pimpinan dalam penyusunan pedoman pembinaan.
- 2) Ketersediaan data hasil supervisi dan evaluasi Pokmaswas sebagai bahan penyusunan.
- 3) Dukungan koordinasi dengan UPT lingkup Ditjen PSDKP.

Kendala

- 1) Proses harmonisasi substansi dengan unit kerja terkait membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- 2) Perlunya penyesuaian materi pedoman terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru.
- 3) Penyusunan dokumen melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga memerlukan koordinasi lintas unit.

Upaya Perbaikan

- 1) Menyusun jadwal penyelesaian dokumen secara lebih rinci (time schedule).
- 2) Meningkatkan intensitas rapat koordinasi dan pembahasan substansi.
- 3) Mempercepat proses reviu dan harmonisasi dokumen.
- 4) Melakukan monitoring mingguan terhadap progres penyusunan pedoman.
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil supervisi lapangan sebagai bahan penyusunan pedoman.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyusunan Pedoman Pembinaan Pokmaswas didukung oleh kegiatan supervisi pembinaan Pokmaswas yang pada Juli 2026 telah menunjukkan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu	Rp76.241.000
Realisasi	Rp76.040.074
Serapan	99,74%

Meskipun serapan anggaran kegiatan pendukung telah mencapai **99,74%**, indikator kinerja belum terealisasi karena karakteristik indikator yang mengukur hasil akhir berupa dokumen pedoman. Sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan pendukung seperti supervisi lapangan, pengumpulan data, koordinasi, dan pembahasan substansi yang menjadi prasyarat penyusunan pedoman.

Dengan demikian, hubungan antara realisasi anggaran dan capaian indikator bersifat tidak linier, karena keluaran akhir baru akan dihasilkan setelah seluruh tahapan penyusunan, harmonisasi, dan penetapan pedoman selesai pada Semester II.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Supervisi Pembinaan Pokmaswas	Menghasilkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan penyusunan pedoman.
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pokmaswas	Mengidentifikasi permasalahan implementasi pembinaan di lapangan.
Koordinasi dengan UPT PSDKP	Menghimpun masukan dan praktik terbaik dalam pembinaan Pokmaswas.
Penyusunan dan Harmonisasi Pedoman	Menyusun substansi pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Pembahasan Internal Direktorat PSP	Memastikan kesesuaian pedoman dengan kebijakan strategis Ditjen PSDKP.

Walaupun indikator belum menunjukkan capaian pada Triwulan II, berbagai kegiatan pendukung telah terlaksana sesuai rencana dan menjadi fondasi penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas pada Semester II Tahun 2026. Penyelesaian dokumen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas, keseragaman, dan efektivitas pembinaan Pokmaswas di seluruh wilayah kerja Ditjen PSDKP.

3. ISK 2.1.1 Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP (%)

Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Implementasi Standar terhadap Sarana Pengawasan SDKP (%) digunakan untuk mengukur tingkat keterpenuhan dan kepatuhan sarana pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) terhadap standar kriteria teknis, prosedur operasional, serta ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan kualitas implementasi standardisasi sarana pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP secara efektif, aman, dan berkelanjutan.

Target persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana Pengawasan SDKP pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 60%. Melalui indikator ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tingkat kepatuhan terhadap standar yang berlaku, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan perbaikan, pemenuhan standar, dan peningkatan kualitas sarana pengawasan SDKP pada periode berikutnya.



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian dan Kesesuaian Implementasi Standar Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	15	0	30	51,45	45	-	60	-

Indikator Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP memperoleh capaian 120% berdasarkan metode pengukuran Maximize Nilai Posisi Akhir. Meskipun nilai realisasi kumulatif pada periode pelaporan sebesar 51,45%, capaian kinerja telah melampaui target antara (milestone) yang ditetapkan pada Semester I.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi standar teknis pada kegiatan pengadaan dan pengembangan sarana pengawasan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Standar teknis telah menjadi acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis, proses pengadaan, pengawasan pelaksanaan kontrak, serta pengendalian mutu sarana pengawasan SDKP.

Capaian yang melampaui target mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan lebih cepat dibandingkan rencana semester sehingga memberikan ruang yang cukup untuk penyelesaian target akhir tahun.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	30	51,45	120%

Sebagai direktorat yang baru terbentuk, Direktorat PSP belum memiliki data historis lima tahun yang lengkap. Namun dibandingkan tahun sebelumnya, implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan menunjukkan peningkatan baik dari sisi kualitas penyusunan standar maupun penerapannya pada kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana pengawasan.

Peningkatan ini menjadi indikator bahwa proses standardisasi telah semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pengelolaan sarana pengawasan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
60	51,45	120%

Target Renstra Tahun 2026 telah berada pada jalur yang sangat baik. Berdasarkan metode penilaian kinerja yang digunakan, capaian telah mencapai 120%, sehingga menunjukkan bahwa implementasi standardisasi berjalan lebih cepat dibandingkan target semester yang telah ditetapkan.

Keberhasilan ini mendukung sasaran strategis Direktorat PSP dalam mewujudkan pembangunan sarana pengawasan yang memenuhi standar teknis, berkualitas, dan andal.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.16. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	60
Realisasi	-

Benchmark

Meskipun realisasi fisik masih sebesar 51,45%, metode pengukuran berbasis Nilai Posisi Akhir menunjukkan bahwa progres pekerjaan telah melampaui target periode pelaporan. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi standar teknis telah terlaksana sesuai tahapan yang direncanakan dan memenuhi ekspektasi organisasi.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

1. Koordinasi pembangunan Program MFISS melalui *weekly meeting* berjalan secara konsisten sehingga pengendalian proyek lebih efektif.
2. Progres pembangunan kapal pengawas 61 meter dan 70 meter berjalan sesuai *milestone* yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi yang baik antara Direktorat PSP, galangan kapal, konsultan desain, Lloyd's Register, dan instansi terkait mendukung kelancaran pelaksanaan proyek.
4. Penguatan tata kelola melalui penyusunan Tim Pengelola Perizinan, registrasi kapal, dan reviu Inspektorat Jenderal meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
5. Pengembangan Dashboard Pacu Jalur dan kerja sama hibah AFMA mendukung modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi.

Kendala

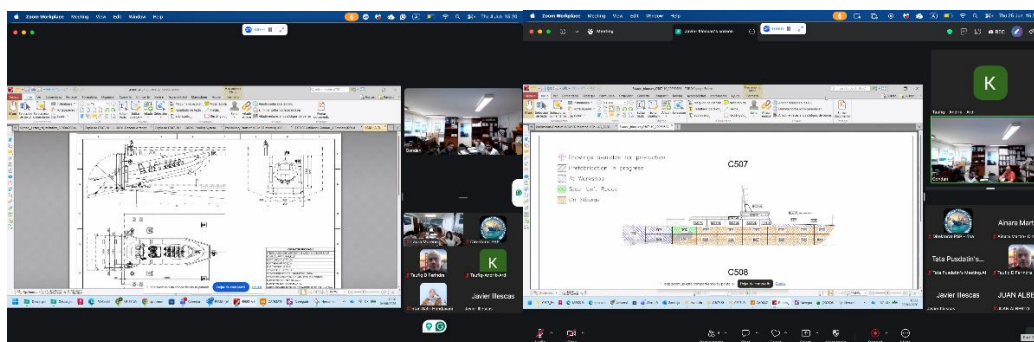
1. Proses *drawing approval*, *Flag State*, registrasi kapal, dan sertifikasi masih memerlukan penyelesaian lintas instansi.
2. Integrasi Dashboard Pacu Jalur dengan sistem CCTV serta penyelesaian UAT masih dalam proses.
3. Sebagian material dan peralatan utama masih dalam tahap pengadaan dan pengiriman sehingga memerlukan pengendalian logistik yang ketat.

Upaya Perbaikan

1. Melaksanakan *weekly meeting* dan monitoring proyek secara berkala untuk memastikan pencapaian target.



2. Mempercepat koordinasi teknis bersama Lloyd's Register dan instansi terkait dalam penyelesaian dokumen teknis serta administrasi.
3. Mempercepat penyelesaian integrasi Dashboard Pacu Jalur, CCTV, dan pelaksanaan UAT.
4. Memperkuat pengendalian proyek melalui reviu berkala, koordinasi lintas sektor, serta monitoring pengadaan material dan pencatatan BMN.



Gambar 3.3. Kegiatan Pengendalian MFISS TW II

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyusunan Supervisi Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP yang pada Juli 2026 telah menunjukkan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.17. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu	Rp594.733.000
Realisasi	Rp305.080.844
Serapan	51,30%

Walaupun serapan anggaran kegiatan pendukung masih berada pada kisaran 10,06%–51,30%, indikator telah mencapai 120% sesuai metode penilaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berlangsung secara efisien. Pelaksanaan supervisi, penyusunan standar teknis, dan pengendalian implementasi telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target tanpa memerlukan penyerapan anggaran secara penuh pada Semester I.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.18. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Penyusunan NSPK Bidang Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan	Menyusun standar teknis sebagai acuan implementasi.
Supervisi Analisis dan Standardisasi Sarana Pengawasan SDKP	Memastikan kesesuaian implementasi standar teknis di lapangan.
Supervisi Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP	Mengawal penerapan standar teknis dalam pembangunan dan pengadaan sarana pengawasan.
Pengembangan MFISS	Mendorong penerapan standar teknis pada modernisasi kapal pengawas, peralatan pengawasan, dan sistem pendukung.
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar	Mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Capaian 120% pada indikator ini menunjukkan bahwa implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan telah berjalan sesuai bahkan melampaui target semester yang ditetapkan. Meskipun realisasi fisik kumulatif sebesar 51,45%, penerapan metode Maximize Nilai Posisi Akhir menggambarkan bahwa tahapan pekerjaan telah berada di atas target yang direncanakan. Didukung oleh penggunaan anggaran yang efisien serta pelaksanaan program supervisi dan standardisasi yang efektif, indikator ini memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas, keseragaman, dan keandalan sarana pengawasan SDKP.

4. ISK 2.1.2 Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator ini mengukur kesiapan prasarana pengawasan SDKP dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dan fungsi pengawasan SDKP, terutama pada unit kerja UPT Ditjen PSDKP. Indeks penilaian kesiapan kondisi prasarana pengawasan utama SDKP memerlukan pemeriksaan, peninjauan, dan pelaporan secara sistematis terhadap 5 (lima) jenis bangunan/ prasarana

pengawasan utama yang masing-masing memiliki nilai bobot sesuai dengan prioritas kebutuhan pada suatu unit kerja teknis pengawasan SDKP, nilai bobot tersebut adalah: (i) Jenis bangunan/prasarana Kantor dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 30; (ii) Jenis bangunan/prasarana Mess dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 25; (iii) Jenis bangunan/prasarana Dermaga dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 20; (iv) Jenis bangunan/prasarana Gudang dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 15; dan (v) Jenis bangunan/prasarana Tempat Penampungan Sementara dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 10. Serta 4 (empat) variabel kriteria kesiapan detail untuk setiap jenis bangunan yaitu: (i) struktur bobot 40, (ii) arsitektur bobot 30, (iii) mekanikal bobot 15 dan (iv) elektrikal bobot 15.

Dan memiliki tujuan sebagai proses mengidentifikasi setiap kekurangan dari 4 variabel tersebut yang memiliki peluang atau memerlukan perbaikan atau penggantian. Serta faktor kriteria lain adalah menjelaskan terkait bobot jenis bangunan dan bobot verifikasi yaitu cara kegiatan supervisi atau pengambilan data dilakukan dengan pengiriman data atau insitu langsung ke lapangan pada objek prasarana yang dimaksud. Pelaporan untuk indikator kinerja ini dilakukan secara semesteran.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	81	81	-	-	81	-

Indikator Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP pada Semester I Tahun 2026 berhasil mencapai nilai 81 atau 100% dari target yang ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kesiapan prasarana pengawasan yang meliputi aspek kondisi fisik, fungsi operasional, kelengkapan fasilitas, dan kesiapan mendukung operasional pengawasan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, serta pengembangan prasarana pengawasan



di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP. Selain itu, pelaksanaan supervisi secara berkala juga berkontribusi dalam memastikan bahwa prasarana yang tersedia tetap layak fungsi dan siap digunakan dalam mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	81	81	100%

Sebagai direktorat yang relatif baru, Direktorat PSP belum memiliki data historis lima tahun secara lengkap. Namun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, kesiapan prasarana pengawasan menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana secara lebih terstruktur.

Peningkatan kesiapan tersebut merupakan hasil dari penguatan proses perencanaan, pelaksanaan supervisi lapangan, serta pengendalian kualitas pembangunan prasarana yang dilakukan secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
81	81	100%



Target Renstra Tahun 2026 berhasil dicapai sesuai rencana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan prasarana pengawasan berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat PSP.

Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sistem pengawasan yang modern dan berkelanjutan, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung proyek *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS).

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.22. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	81
Realisasi	81

Benchmark

Sampai dengan Tahun 2026 belum terdapat standar nasional yang secara spesifik mengatur nilai Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP. Oleh karena itu, benchmark yang digunakan adalah target kinerja internal Direktorat Jenderal PSDKP.

Nilai indeks telah memenuhi benchmark organisasi, yang menunjukkan bahwa kesiapan prasarana pengawasan telah sesuai dengan standar internal yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Direktorat PSP dalam menjaga kualitas dan kesiapan infrastruktur pengawasan untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) tersusunnya rencana pengembangan prasarana yang lebih terarah;
- 2) pelaksanaan supervisi dan monitoring kondisi prasarana secara berkala;
- 3) koordinasi yang baik dengan UPT dalam pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana;
- 4) dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan dan supervisi prasarana;
- 5) penerapan standar teknis dalam pembangunan dan rehabilitasi prasarana.

Kendala

Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi:

- 1) masih terdapat prasarana di beberapa UPT yang memerlukan rehabilitasi lanjutan;
- 2) proses pembangunan fisik pada beberapa lokasi masih berlangsung sehingga belum seluruhnya dapat dinilai;
- 3) kondisi geografis wilayah kerja menyebabkan pelaksanaan monitoring memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Upaya Perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks pada periode berikutnya antara lain:

- 1) mempercepat penyelesaian pembangunan dan rehabilitasi prasarana;
- 2) meningkatkan frekuensi monitoring kondisi prasarana di UPT;
- 3) memperkuat sistem inventarisasi dan penilaian kondisi prasarana secara digital;
- 4) melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan rehabilitasi dan pemeliharaan.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan supervisi prasarana pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3.23. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu	Rp241.009.000
Realisasi	Rp93.261.626
Serapan	38,70%

Dengan tingkat serapan anggaran 38,70%, indikator telah mencapai target sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung peningkatan kesiapan prasarana pengawasan.

Efisiensi tersebut diperoleh melalui pelaksanaan supervisi yang terarah, optimalisasi kegiatan monitoring, serta pemanfaatan hasil evaluasi kondisi prasarana sebagai dasar pengambilan keputusan. Sisa anggaran pada Semester II akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas prasarana pada lokasi prioritas.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.24. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Supervisi Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP	Memastikan kesiapan dan kelayakan prasarana pengawasan melalui supervisi lapangan.
Supervisi Perencanaan Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Menyusun arah pengembangan prasarana yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Induk Pengembangan Prasarana	Menyediakan pedoman teknis dalam pembangunan dan pengembangan prasarana.

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Monitoring dan Evaluasi Prasarana UPT	Mengidentifikasi kondisi prasarana dan kebutuhan rehabilitasi.
Proyek MFISS	Mendukung peningkatan kesiapan prasarana sebagai bagian dari modernisasi sistem pengawasan SDKP.

Indikator Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP berhasil mencapai target dengan nilai 81 atau 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa prasarana pengawasan telah berada pada tingkat kesiapan yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan supervisi yang konsisten, penguatan perencanaan pengembangan prasarana, serta pemanfaatan anggaran yang efektif. Pada Semester II Tahun 2026, Direktorat PSP akan terus mempercepat penyelesaian pembangunan dan rehabilitasi prasarana guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan dan mendukung implementasi proyek strategis MFISS.

5. ISK 2.1.3 Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP

Kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan indikator kinerja dengan mengukur tingkat kesesuaian antara hasil penyediaan prasarana pengawasan yang ada di UPT Ditjen PSDKP dengan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/2020 Tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan bersumber dari penilaian terhadap kesesuaian jumlah prasarana pengawasan di setiap UPT Ditjen PSDKP. Prasarana pengawasan yang dinilai kesesuaiannya adalah Prasarana Pengawasan Utama yang terdiri dari: Kantor/Bangunan Pengawasan, Dermaga Kapal Pengawas, Mess, Penampungan Sementara, Gudang dengan periode pelaporan secara tahunan.



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.25. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	60	-

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP belum menunjukkan realisasi karena implementasi standar teknis prasarana masih berada pada tahap penyusunan dokumen, harmonisasi substansi, serta persiapan penerapan di lapangan. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, implementasi dan penilaian kesesuaian baru akan dilakukan setelah dokumen standardisasi ditetapkan dan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi prasarana pengawasan pada Semester II.

Dengan demikian, capaian sebesar 0% pada periode pelaporan tidak mencerminkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, melainkan menunjukkan bahwa indikator ini merupakan **milestone indicator** yang baru dapat diukur setelah tahapan penyusunan standar teknis selesai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	60	-	-

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan merupakan unit kerja yang masih dalam tahap penguatan kelembagaan sehingga data historis lima tahun untuk indikator ini belum tersedia secara lengkap. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada Tahun 2026 telah dimulai proses penyusunan standardisasi yang lebih komprehensif sebagai dasar implementasi kriteria teknis prasarana pengawasan.

Karena indikator ini berbasis penyelesaian tahapan pekerjaan, capaian pada Triwulan II belum dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator yang bersifat kumulatif. Evaluasi yang lebih representatif akan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh proses implementasi selesai.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
60	-	-

Dalam Renstra Direktorat PSP, implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan ditargetkan mulai diterapkan pada Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan prasarana pengawasan SDKP.

Sampai dengan Triwulan II, indikator belum terealisasi karena tahapan implementasi masih menunggu penyelesaian dokumen standar teknis. Meskipun demikian, seluruh tahapan persiapan masih berjalan sesuai jadwal sehingga target Renstra pada akhir tahun diproyeksikan tetap dapat dicapai.



d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	60
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat standar nasional yang secara khusus menetapkan persentase implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan. Oleh karena itu, benchmark yang digunakan adalah target internal Direktorat Jenderal PSDKP.

Pada periode pelaporan, implementasi belum dapat dilakukan karena standar teknis masih dalam tahap penyusunan. Oleh sebab itu, perbandingan dengan benchmark belum dapat dilakukan secara optimal. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian implementasi akan dilakukan setelah dokumen standardisasi ditetapkan dan diterapkan pada kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi prasarana.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

Meskipun indikator belum terealisasi, beberapa kegiatan pendukung telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) inventarisasi kebutuhan standardisasi prasarana pengawasan;
- 2) penyusunan konsep standar teknis berdasarkan kebutuhan operasional;
- 3) koordinasi dengan unit teknis dan UPT sebagai pengguna prasarana;
- 4) pengumpulan data kondisi eksisting prasarana pengawasan.

Kendala

Beberapa kendala yang mempengaruhi belum tercapainya indikator meliputi:

- 1) proses penyusunan standar teknis masih memerlukan pembahasan dan harmonisasi lintas unit;
- 2) perlunya penyesuaian standar terhadap regulasi terbaru dan perkembangan teknologi;
- 3) implementasi standar baru dapat dilakukan setelah dokumen resmi ditetapkan;
- 4) sebagian kegiatan pembangunan prasarana masih berada pada tahap perencanaan sehingga belum dapat dijadikan objek penilaian implementasi.

Upaya Perbaikan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian indikator antara lain:

- 1) mempercepat penyelesaian penyusunan NSPK bidang prasarana pengawasan;
- 2) meningkatkan intensitas koordinasi dengan unit teknis dan UPT;
- 3) menyusun jadwal implementasi standar secara bertahap;
- 4) melakukan monitoring berkala terhadap progres penyusunan dan penerapan standar;
- 5) menyiapkan pedoman evaluasi kesesuaian implementasi standar teknis.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyusunan Supervisi Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP yang pada Juli 2026 telah menunjukkan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.29. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu	Rp241.009.000
Realisasi	Rp93.261.626
Serapan	38,70%



Walaupun indikator belum menghasilkan capaian kinerja pada Triwulan II, penggunaan anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung tahapan awal penyusunan standar teknis, koordinasi, supervisi, dan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, realisasi anggaran telah menghasilkan output antara (intermediate output) yang menjadi prasyarat bagi implementasi standar pada Semester II.

Efisiensi penggunaan sumber daya akan terlihat lebih optimal setelah standar teknis selesai disusun dan mulai diterapkan pada kegiatan pembangunan serta rehabilitasi prasarana pengawasan.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.30. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Penyusunan NSPK Bidang Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan	Menyusun dokumen standar teknis sebagai dasar implementasi.
Supervisi Analisis dan Standardisasi Prasarana Pengawasan SDKP	Melakukan identifikasi kebutuhan dan kesiapan implementasi standar teknis.
Supervisi Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP	Memastikan pembangunan prasarana mengacu pada standar teknis yang ditetapkan.
Monitoring dan Evaluasi Kondisi Prasarana UPT	Menyediakan data sebagai dasar penyusunan standar teknis.
Koordinasi Teknis dengan UPT dan Unit Terkait	Menyelaraskan substansi standar dengan kebutuhan operasional di lapangan.

6. ISK 2.1.4 Nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP

Nilai Kualitas Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan ukuran capaian kinerja yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai tahapan penyusunan rencana induk yang telah dilaksanakan dengan jumlah rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan.



Penilaian ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kualitas proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan.

Proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan melalui lima tahapan utama. Tahap pertama dengan nilai 15 adalah persiapan dan perencanaan awal yang meliputi pembentukan tim penyusun (nilai 5), penyusunan Kerangka Acuan Kerja (ToR) (nilai 5), dan penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (nilai 5). Tahap kedua dengan nilai 15 adalah pengumpulan dan validasi data yang meliputi inventarisasi kebutuhan sarana (nilai 5), validasi dan pemutakhiran data sarana (nilai 5), dan pengumpulan data pendukung tambahan (nilai 5). Tahap ketiga dengan nilai 20 adalah analisis data dan identifikasi kesenjangan yang meliputi analisis kondisi eksisting dibandingkan dengan kebutuhan ideal (nilai 10), serta analisis prioritas kebutuhan sarana pengawasan (nilai 10).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.31. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai kualitas rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	40	-

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Kualitas Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP belum memperoleh nilai karena dokumen Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP (Master Plan) masih dalam tahap penyusunan. Tahapan yang telah dilaksanakan meliputi pengumpulan data, identifikasi kebutuhan sarana pengawasan, analisis kondisi eksisting, penyusunan konsep pengembangan, serta koordinasi dengan unit teknis terkait.

Dokumen rencana induk merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar arah pengembangan sarana pengawasan dalam jangka menengah

dan panjang. Oleh karena itu, penilaian kualitas baru dapat dilakukan setelah dokumen selesai disusun, direviu, dan ditetapkan. Dengan demikian, belum adanya realisasi pada Semester I merupakan konsekuensi dari tahapan pekerjaan yang memang dijadwalkan selesai pada Semester II Tahun 2026.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	40	-	-

Sebagai direktorat yang baru terbentuk, Direktorat PSP belum memiliki data historis lima tahun untuk indikator ini. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP pada Tahun 2026 merupakan bagian dari penguatan sistem perencanaan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan organisasi.

Dibandingkan tahun sebelumnya, penyusunan master plan pada Tahun 2026 memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan arah modernisasi sarana pengawasan, kebutuhan operasional UPT, perkembangan teknologi, serta dukungan terhadap proyek strategis *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS).



c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
40	-	-

Dalam dokumen Renstra Direktorat PSP, penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pengembangan sarana yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Meskipun pada Triwulan II indikator belum menunjukkan realisasi, proses penyusunan masih berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dengan mempertimbangkan progres penyusunan dokumen dan pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan, target Renstra diproyeksikan dapat dicapai pada akhir Tahun 2026.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.34. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	64
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat standar nasional yang secara khusus menetapkan nilai kualitas Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP. Oleh karena itu, benchmark yang digunakan adalah target internal Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan kriteria kualitas dokumen perencanaan.

Karena dokumen masih dalam tahap penyusunan, kualitas dokumen belum dapat dinilai maupun dibandingkan dengan benchmark organisasi. Penilaian akan dilakukan setelah dokumen selesai dan memenuhi aspek substansi, kelengkapan, keterpaduan dengan Renstra KKP dan Ditjen PSDKP, serta kelayakan implementasi.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

Tahapan penyusunan dokumen didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) tersedianya data kondisi eksisting sarana pengawasan;
- 2) dukungan pimpinan terhadap penyusunan master plan sebagai dokumen strategis;
- 3) koordinasi yang baik dengan unit teknis dan UPT;
- 4) tersedianya hasil supervisi sebagai dasar penyusunan arah pengembangan.

Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) penyusunan master plan memerlukan data yang komprehensif dari seluruh wilayah kerja;
- 2) perlunya sinkronisasi dengan kebijakan nasional, Renstra KKP, dan program prioritas Ditjen PSDKP;
- 3) perkembangan teknologi sarana pengawasan yang dinamis memerlukan penyesuaian substansi dokumen;
- 4) proses pembahasan dan reviu lintas unit membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Upaya Perbaikan

Untuk mempercepat pencapaian indikator dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mempercepat pengumpulan dan validasi data kebutuhan sarana pengawasan;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan UPT dan unit teknis terkait;

- 3) melakukan pembahasan berkala terhadap substansi dokumen;
- 4) menyusun jadwal penyelesaian secara rinci dan melakukan monitoring mingguan;
- 5) memastikan keterpaduan dokumen dengan proyek strategis MFISS dan kebijakan nasional pengawasan SDKP.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP didukung oleh beberapa kegiatan perencanaan dan supervisi.

Tabel 3.35. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
NSPK Bidang Perencanaan Induk			
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Rp46.827.000	Rp9.445.900	20,17%
Supervisi Perencanaan Induk			
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Rp46.480.000	Rp39.360.561	84,68%

Realisasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan konsep rencana induk melalui kegiatan survei, koordinasi, pengumpulan data, supervisi, dan pembahasan teknis. Meskipun indikator belum menghasilkan nilai pada Triwulan II, penggunaan anggaran telah menghasilkan output antara berupa data dasar, analisis kebutuhan, dan rancangan awal dokumen.

Karena indikator mengukur kualitas dokumen akhir, efisiensi penggunaan sumber daya baru dapat dievaluasi secara menyeluruh setelah dokumen selesai disusun dan dilakukan penilaian terhadap kualitasnya.



g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.36. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
NSPK Bidang Perencanaan Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Menyusun kerangka kebijakan dan arah pengembangan sarana pengawasan.
Supervisi Perencanaan Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Menghimpun data lapangan sebagai dasar penyusunan master plan.
Monitoring dan Evaluasi Sarana Pengawasan	Mengidentifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan pengembangan.
Koordinasi dengan UPT dan Unit Teknis	Menyelaraskan rencana pengembangan dengan kebutuhan operasional.
Pengembangan Proyek MFISS	Menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan arah pengembangan sarana pengawasan modern.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Kualitas Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP belum memperoleh capaian karena dokumen masih dalam proses penyusunan. Meskipun demikian, tahapan penyusunan telah berjalan sesuai rencana melalui pengumpulan data, supervisi, koordinasi, dan penyusunan konsep dokumen. Penyelesaian master plan pada Semester II akan menjadi dasar penting bagi pengembangan sarana pengawasan SDKP yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung modernisasi sistem pengawasan melalui implementasi proyek strategis MFISS.



7. ISK 2.1.5 Nilai kualitas rencana induk pengembangan Prasarana pengawasan SDKP

Nilai Kualitas Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan ukuran capaian kinerja yang dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai tahapan penyusunan rencana induk yang telah dilaksanakan dengan jumlah rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan. Penilaian ini mencerminkan tingkat kemajuan dan kualitas proses perencanaan yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan.

Proses penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan melalui lima tahapan utama. Tahap pertama dengan nilai 15 adalah persiapan dan perencanaan awal yang meliputi pembentukan tim penyusun (nilai 5), penyusunan Kerangka Acuan Kerja (ToR) (nilai 5), dan penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (nilai 5). Tahap kedua dengan nilai 15 adalah pengumpulan dan validasi data yang meliputi inventarisasi kebutuhan prasarana (nilai 5), validasi dan pemutakhiran data prasarana (nilai 5), dan pengumpulan data pendukung tambahan (nilai 5). Tahap ketiga dengan nilai 20 adalah analisis data dan identifikasi kesenjangan yang meliputi analisis kondisi eksisting dibandingkan dengan kebutuhan ideal (nilai 10), serta analisis prioritas kebutuhan prasarana pengawasan (nilai 10).

Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP yang disusun mencakup prasarana pengawasan utama dan prasarana pengawasan pendukung sebagai dasar perencanaan pengadaan dan pengembangan prasarana pengawasan secara terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.37. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai kualitas rencana induk pengembangan Prasarana pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	40	-



Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Kualitas Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP belum memperoleh nilai karena dokumen Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP (*Master Plan*) masih dalam tahap penyusunan. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi inventarisasi kondisi eksisting prasarana pengawasan, identifikasi kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi, analisis kesenjangan (*gap analysis*), serta penyusunan konsep arah pengembangan prasarana.

Rencana induk tersebut disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan dan pengembangan prasarana pengawasan secara terpadu, sehingga penilaian kualitas baru dapat dilakukan setelah dokumen selesai disusun, direviu, dan ditetapkan. Oleh karena itu, belum adanya nilai pada Semester I merupakan konsekuensi dari tahapan pekerjaan yang memang direncanakan selesai pada Semester II Tahun 2026.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	40	-	-

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan merupakan unit organisasi yang relatif baru sehingga belum tersedia data historis lima tahun untuk indikator ini. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan pada Tahun 2026 merupakan langkah awal dalam membangun sistem perencanaan prasarana yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.



Berbeda dengan dokumen perencanaan sebelumnya yang masih bersifat sektoral, penyusunan master plan Tahun 2026 mengintegrasikan kebutuhan pembangunan kantor operasional, dermaga, pos pengawasan, gudang logistik, hanggar, serta fasilitas pendukung lainnya dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan kebutuhan operasional Ditjen PSDKP.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.39. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
40	-	-

Dalam Renstra Direktorat PSP, penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan prasarana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Walaupun hingga Triwulan II indikator belum menunjukkan capaian, progres penyusunan dokumen masih berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dengan tersedianya data hasil monitoring lapangan dan supervisi UPT, penyelesaian dokumen pada Semester II diharapkan dapat memenuhi target Renstra Tahun 2026.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.40. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	40
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat standar nasional yang secara khusus menetapkan nilai kualitas Rencana Induk Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP. Oleh karena itu, benchmark yang digunakan adalah target internal Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan kriteria kualitas dokumen perencanaan.

Karena dokumen masih dalam tahap penyusunan, kualitas dokumen belum dapat dinilai maupun dibandingkan dengan benchmark organisasi. Penilaian akan dilakukan setelah dokumen selesai dan memenuhi aspek substansi, kelengkapan, keterpaduan dengan Renstra KKP dan Ditjen PSDKP, serta kelayakan implementasi.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

Penyusunan dokumen didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) tersedianya hasil monitoring dan evaluasi kondisi prasarana pengawasan di UPT;
- 2) adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat sistem perencanaan prasarana;
- 3) koordinasi yang baik dengan unit teknis dan pemangku kepentingan terkait;
- 4) tersedianya data kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sebagai bahan penyusunan master plan.

Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan dokumen meliputi:

- 1) data kondisi prasarana dari beberapa UPT masih memerlukan proses validasi;
- 2) penyelarasan kebutuhan pembangunan dengan keterbatasan anggaran memerlukan prioritas yang cermat;
- 3) perlunya sinkronisasi dengan kebijakan nasional, Renstra KKP, dan rencana pengembangan proyek strategis seperti MFISS;
- 4) proses pembahasan lintas unit memerlukan waktu yang cukup panjang.



Upaya Perbaikan

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian indikator meliputi:

- 1) mempercepat validasi data kondisi prasarana pada seluruh UPT;
- 2) meningkatkan koordinasi teknis dengan unit perencanaan dan unit pengguna;
- 3) melakukan pembahasan substansi secara berkala agar penyusunan dokumen sesuai jadwal;
- 4) menyusun roadmap pengembangan prasarana berdasarkan skala prioritas;
- 5) memastikan keterpaduan master plan dengan arah pembangunan pengawasan nasional dan implementasi MFISS.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan indikator ini didukung oleh kegiatan penyusunan NSPK dan supervisi perencanaan induk pengembangan prasarana.

Tabel 3.41. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
NSPK Bidang Perencanaan Induk			
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Rp46.827.000	Rp9.445.900	20,17%
Supervisi Perencanaan Induk			
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Rp46.480.000	Rp39.360.561	84,68%

Realisasi anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan survei lapangan, pengumpulan data, koordinasi dengan UPT, penyusunan konsep dokumen, serta supervisi terhadap kondisi prasarana pengawasan. Walaupun indikator belum menghasilkan nilai pada Semester I, penggunaan anggaran telah menghasilkan output antara, yaitu tersedianya data, analisis kebutuhan, dan rancangan awal Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan.



Efektivitas penggunaan anggaran akan semakin terlihat setelah dokumen selesai disusun dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan prasarana secara nasional.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.42. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
NSPK Bidang Perencanaan Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Menyusun kerangka kebijakan dan metodologi penyusunan master plan prasarana.
Supervisi Perencanaan Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Mengumpulkan data lapangan dan memvalidasi kebutuhan pengembangan prasarana.
Supervisi Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP	Mengidentifikasi kondisi eksisting serta kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan prasarana.
Monitoring dan Evaluasi Prasarana UPT	Menyediakan data teknis sebagai dasar penyusunan rencana induk.
Dukungan Proyek MFISS	Menjadi referensi dalam pengembangan prasarana modern yang terintegrasi dengan sistem pengawasan nasional.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Kualitas Rencana Induk Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP belum memperoleh capaian karena dokumen masih berada pada tahap penyusunan. Namun demikian, seluruh tahapan persiapan, mulai dari inventarisasi kondisi prasarana, pengumpulan data, supervisi lapangan, hingga penyusunan konsep dokumen telah berjalan sesuai rencana. Penyelesaian master plan pada Semester II diharapkan menjadi landasan strategis dalam pembangunan dan pengembangan prasarana pengawasan SDKP yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung modernisasi sistem pengawasan melalui implementasi MFISS.



8. ISK 2.1.6 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP

Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP merupakan penilaian dokumen reviu perencanaan rekondisi kapal hasil tangkapan tindak pidana kelautan dan perikanan. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) persiapan berupa pembentukan tim teknis; (2) pengumpulan bahan berupa (a) pengumpulan data dukung dan (b) penyusunan draf Kerangka Acuan Kerja/KAK dan Rencana Anggaran dan Biaya/RAB; (3) pelaksanaan berupa dokumen pemilihan dan kontrak; (4) hasil pelaksanaan berupa a) spesifikasi teknis, b) gambar teknis, c) perhitungan teknis, d) jadwal pelaksanaan, e) engineer estimate. Kegiatan perencanaan rekondisi kapal hasil tangkapan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka alih fungsi kapal ikan agar memenuhi syarat menjadi kapal pengawas kelautan dan perikanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.43. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tahun 2026	5	5	25	25	50	-	100	-

Indikator Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP memperoleh capaian 100% berdasarkan metode penilaian Maximize – Nilai akumulasi. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, nilai akumulasi yang dicapai adalah 25, sesuai dengan target tahapan (milestone) yang telah ditetapkan pada periode pelaporan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP telah berjalan sesuai rencana, meliputi pembentukan tim teknis, pengumpulan data



dukung, penyusunan draf kerangka acuan kerja/KAK dan rencana anggaran dan biaya/RAB. Hasil yang dicapai pada Semester I menjadi dasar untuk penyempurnaan dan finalisasi dokumen pada Semester II sehingga target akhir tahun dapat tercapai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.44. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	25	25	100%

Sebagai indikator kinerja yang baru pada Direktorat PSP, data historis lima tahun belum tersedia sehingga capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
100	25	100%

Meskipun nilai realisasi kumulatif baru mencapai 25, berdasarkan mekanisme penilaian berbasis Nilai Posisi Akhir, progres pekerjaan telah memenuhi target Semester I sehingga capaian kinerja tercatat 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan standardisasi berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Renstra.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.46. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	100
Realisasi	-

Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target tahapan Semester I dalam aplikasi Kinerjaku. Realisasi sebesar 25 telah sesuai dengan target milestone, sehingga indikator memperoleh capaian 100% dan menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan standardisasi berjalan sesuai jadwal.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Penyusunan Manual IKU 2026 mencakup penyempurnaan definisi formula, indikator, serta penetapan target bertahap hingga 100% pada 2027-2029. Selain itu, pembahasan strategis meliputi penyusunan NSPK, perencanaan kebutuhan sarana prasarana tahun 2027 berbasis master plan dan legalitas lahan, serta rekonsiliasi dokumen kinerja untuk memastikan keselarasan antar unit. Arahan pimpinan juga menekankan percepatan program prioritas seperti MFISS, optimalisasi aset dan teknologi (ROV), penyelesaian regulasi, serta penguatan koordinasi, SDM, dan monitoring berkala guna mendukung pencapaian target organisasi secara efektif dan akuntabel.

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) tersedianya data sarana pengawasan sebagai dasar penyusunan standar kriteria teknis;

- 2) koordinasi yang efektif dengan unit teknis lingkup Ditjen PSDKP, UPT PSDKP, dan instansi terkait;
- 3) keterlibatan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perkapalan;
- 4) pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- 5) dukungan tenaga ahli dan tim penyusun dalam penyempurnaan substansi dokumen;
- 6) dukungan kebijakan modernisasi sarana pengawasan.

Kendala

Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi:

- 1) ketersediaan anggaran yang terbatas;
- 2) adanya penyesuaian kebutuhan teknis di lapangan yang membutuhkan waktu dan koordinasi antar pelaksana;
- 3) proses pelaksanaan tergantung oleh tenaga ahli.

Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan kualitas rancangan standardisasi pada periode berikutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) koordinasi yang intens dengan para pelaksana kegiatan;
- 2) koordinasi pengguna sarana pengawasan di UPT PSDKP;
- 3) mengadopsi perkembangan teknologi terbaru dalam penyusunan standar;
- 4) memperkuat proses validasi teknis melalui forum pembahasan lintas unit.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan reviu perencanaan rekondisi kapal hasil tangkapan:

Tabel 3.47. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
Reviu Perencanaan Rekondisi kapal Hasil Tangkapan	Rp141.187.000	Rp14.253.805	10%

Dengan tingkat serapan anggaran yang masih rendah pada kegiatan Reviu Perencanaan Rekondisi kapal Hasil Tangkapan (10%), indikator telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP telah dilaksanakan secara efisien melalui optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan hasil supervisi lapangan, serta koordinasi lintas unit yang efektif.

Sisa anggaran akan dimanfaatkan pada Semester II untuk penyempurnaan dokumen, proses harmonisasi, sosialisasi, serta implementasi standar teknis pada kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana pengawasan

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini meliputi:

Tabel 3.48. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
NSPK Bidang Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan	Menyusun rancangan standar teknis sarana pengawasan sebagai pedoman nasional.
Supervisi Analisis dan Standardisasi Sarana Pengawasan SDKP	Mengidentifikasi kebutuhan teknis dan memastikan kesesuaian rancangan dengan kondisi lapangan.
Supervisi Pengembangan Sarana Pengawasan SDKP	Memberikan masukan teknis terhadap penerapan standar pada kegiatan pengadaan dan pembangunan sarana.
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Standar	Menyediakan umpan balik untuk penyempurnaan rancangan standardisasi.
Dukungan Proyek MFISS	Menjadi referensi dalam penyusunan standar teknis sarana pengawasan modern yang terintegrasi.

Indikator Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP berhasil mencapai target dengan nilai 25 atau 100%.



Keberhasilan ini menunjukkan bahwa rancangan standardisasi telah memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan dan siap menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana pengawasan SDKP. Didukung oleh penggunaan sumber daya yang efisien, koordinasi lintas unit yang baik, serta pemanfaatan hasil supervisi dan evaluasi lapangan, indikator ini memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan standardisasi sarana pengawasan yang lebih andal, seragam, dan berkelanjutan.

9. ISK 2.1.7 Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP

Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian dokumen penyusunan standar operasional prosedur standardisasi kriteria prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pencapaian IKU ini diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan melalui beberapa tahapan yaitu: (1) persiapan berupa (a) pengumpulan bahan dan (b) penyusunan draf standar operasional prosedur; (2) pelaksanaan berupa verifikasi dan validasi standar operasional prosedur. Penyusunan standar operasional prosedur bertujuan sebagai panduan dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.49. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	0	0	100	100	-	-	-	-

Indikator **Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP** berhasil mencapai nilai **100** atau **100%** dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa



rancangan standardisasi telah disusun sesuai dengan ruang lingkup, metodologi, dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga memenuhi standar kualitas dokumen yang dipersyaratkan.

Dokumen rancangan standardisasi menjadi pedoman teknis dalam penyusunan spesifikasi pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana pengawasan SDKP agar pelaksanaannya lebih seragam, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	100	100	100%

Sebagai indikator kinerja yang baru pada Direktorat PSP, data historis lima tahun belum tersedia sehingga capaian indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
100	100	100%

Target Renstra Tahun 2026 telah tercapai sepenuhnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan standardisasi berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan dan mendukung sasaran strategis Direktorat PSP dalam mewujudkan pembangunan prasarana



pengawasan yang memenuhi standar teknis, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dokumen yang telah disusun akan menjadi dasar dalam penyusunan spesifikasi teknis pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengawasan pada tahun-tahun berikutnya.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	100
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat standar nasional yang secara khusus menetapkan nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP. Oleh karena itu, benchmark yang digunakan adalah target internal Direktorat Jenderal PSDKP.

Nilai kualitas rancangan telah memenuhi benchmark organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen telah memenuhi aspek kelengkapan substansi, kesesuaian dengan ketentuan teknis, keterpaduan dengan kebijakan pembangunan prasarana, serta dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) tersedianya data kondisi eksisting prasarana pengawasan sebagai dasar penyusunan standar operasional prosedur;
- 2) koordinasi yang efektif dengan unit teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT PSDKP;

- 3) pelaksanaan supervisi lapangan untuk memperoleh masukan teknis;

Kendala

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 4) perkembangan teknologi konstruksi dan infrastruktur yang memerlukan pembaruan standar secara berkala;
- 5) karakteristik geografis dan kebutuhan operasional UPT yang berbeda sehingga memerlukan fleksibilitas penerapan standar;
- 6) perlunya harmonisasi berkelanjutan dengan regulasi dan standar teknis nasional.

Upaya Perbaikan

Upaya yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi:

- 1) melakukan reviu dan pembaruan standar teknis secara berkala;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan pengguna prasarana di UPT;
- 3) memperkuat monitoring implementasi standar pada pembangunan prasarana;
- 4) menyusun pedoman implementasi dan evaluasi standar teknis;
- 5) mengembangkan sistem dokumentasi digital untuk memudahkan pengelolaan standar.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyusunan Supervisi Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP yang pada Juli 2026 telah menunjukkan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.53. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
NSPK Bidang Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan	Rp48.078.000	Rp4.835.675	10,06%
Supervisi Analisis dan Standardisasi Sarana Pengawasan SDKP	Rp30.161.000	Rp8.326.580	27,61%

Walaupun tingkat serapan anggaran pada kegiatan penyusunan NSPK dan supervisi belum mencapai 100%, indikator telah memenuhi target kualitas dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara efektif melalui optimalisasi koordinasi, pemanfaatan hasil monitoring lapangan, dan penyusunan dokumen secara bertahap.

Efisiensi penggunaan anggaran tercermin dari tercapainya target kualitas rancangan tanpa memerlukan penyerapan anggaran secara penuh pada Semester I. Sisa anggaran akan dimanfaatkan untuk sosialisasi, penyempurnaan, dan implementasi standar teknis pada Semester II.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini meliputi:

Tabel 3.54. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
NSPK Bidang Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan	Menyusun rancangan standar teknis prasarana sebagai pedoman nasional.
Supervisi Analisis dan Standardisasi Prasarana Pengawasan SDKP	Memastikan rancangan sesuai dengan kebutuhan operasional dan kondisi lapangan.
Supervisi Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP	Memberikan masukan teknis terhadap penerapan standar pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana.
Monitoring dan Evaluasi Prasarana UPT	Menjadi dasar penyempurnaan substansi rancangan standardisasi.
Dukungan Proyek MFISS	Mengintegrasikan kebutuhan prasarana modern dalam penyusunan standar teknis.

Indikator Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dokumen rancangan telah memenuhi standar kualitas organisasi dan siap menjadi acuan dalam

pembangunan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana pengawasan SDKP. Selain memperkuat tata kelola prasarana, pencapaian ini mendukung modernisasi infrastruktur pengawasan yang lebih terstandar, efektif, dan berkelanjutan.

10. IKSK.02.8 Persentase penyelesaian rencana NSPK bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana (Persentase)

Persentase penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana merupakan ukuran capaian kinerja yang menggambarkan tingkat penyelesaian penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah target rancangan NSPK yang harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Rancangan NSPK mencakup seluruh dokumen NSPK dan/atau produk peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang telah mencapai tahap siap untuk ditindaklanjuti ke proses *legal drafting*. Penyusunan dilakukan secara internal oleh tim kerja melalui metode daring dan/atau luring, dengan prinsip efisiensi waktu, biaya, serta akuntabilitas proses.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.55. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Persentase Penyelesaian Rencana NSPK Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	100	-

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, indikator **Persentase Penyelesaian Rencana NSPK Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP** belum memperoleh capaian karena pengukuran indikator dilakukan berdasarkan dokumen NSPK yang telah

selesai disusun, disahkan, dan ditetapkan, yang dijadwalkan selesai pada akhir Tahun 2026.

Meskipun capaian kinerja masih 0%, berbagai tahapan penyusunan telah dilaksanakan sesuai rencana, meliputi identifikasi kebutuhan NSPK, penyusunan kerangka dokumen, pengumpulan data, koordinasi dengan unit teknis, serta pembahasan substansi. Dengan demikian, belum adanya capaian bukan disebabkan keterlambatan pelaksanaan, tetapi karena karakteristik indikator yang hanya diukur setelah seluruh output selesai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	100	-	-

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Semester I. Dibandingkan tahun sebelumnya, proses penyusunan NSPK Tahun 2026 telah dimulai lebih awal melalui penyusunan konsep, pengumpulan data, dan koordinasi lintas unit. Hal ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian dokumen sesuai target pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
100	-	-

Dalam Renstra Direktorat PSP, penyelesaian NSPK merupakan target yang akan dicapai pada akhir Tahun 2026. Oleh karena itu, realisasi Semester I masih 0% karena dokumen belum selesai dan belum ditetapkan. Seluruh tahapan persiapan masih berjalan sesuai jadwal sehingga target Renstra tetap diproyeksikan dapat dicapai pada akhir tahun.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.58. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	100
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat standar nasional mengenai penyelesaian NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan. Benchmark yang digunakan adalah target internal organisasi. Karena indikator dihitung pada akhir tahun, capaian Semester I belum dapat dibandingkan secara proporsional dengan target akhir tahun.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

- 1) Telah dilakukan inventarisasi kebutuhan penyusunan NSPK.
- 2) Tersedia data hasil monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana pengawasan.
- 3) Koordinasi dengan unit teknis dan UPT telah dilaksanakan.
- 4) Tersedia dukungan kebijakan penyusunan NSPK sebagai dasar pengembangan prasarana dan sarana.

Kendala

- 1) Penyusunan NSPK memerlukan harmonisasi dengan berbagai regulasi.
- 2) Proses pembahasan lintas unit membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- 3) Dokumen baru dapat dinilai setelah seluruh substansi selesai dan ditetapkan.
- 4) Beberapa data teknis masih dalam proses validasi.

Upaya Perbaikan

- 1) Mempercepat penyusunan substansi NSPK.
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas unit.
- 3) Menyusun jadwal penyelesaian secara lebih rinci.
- 4) Melaksanakan monitoring berkala terhadap progres penyusunan.
- 5) Mempercepat proses harmonisasi dan reviu dokumen.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyusunan penyelesaian NSPK bidang pengembangan prasarana dan sarana pengawasan yang pada Juli 2026 telah menunjukkan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.59. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
NSPK Bidang Perencanaan Induk			
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Rp46.827.000	Rp9.445.900	20,17%
Supervisi Perencanaan Induk			
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan	Rp46.480.000	Rp39.360.561	84,68%

Walaupun indikator belum menghasilkan capaian kinerja pada Semester I, penggunaan anggaran telah menghasilkan output antara (intermediate output) berupa pengumpulan data, koordinasi teknis, penyusunan konsep NSPK, serta supervisi lapangan. Dengan demikian, anggaran telah

dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung tahapan penyusunan dokumen yang menjadi prasyarat pencapaian indikator pada akhir tahun.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.60. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
NSPK Bidang Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan	Menyusun rancangan standar teknis prasarana sebagai pedoman nasional.
Supervisi Analisis dan Standardisasi Prasarana Pengawasan SDKP	Memastikan rancangan sesuai dengan kebutuhan operasional dan kondisi lapangan.
Supervisi Pengembangan Prasarana Pengawasan SDKP	Memberikan masukan teknis terhadap penerapan standar pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana.
Monitoring dan Evaluasi Prasarana UPT	Menjadi dasar penyempurnaan substansi rancangan standardisasi.
Dukungan Proyek MFISS	Mengintegrasikan kebutuhan prasarana modern dalam penyusunan standar teknis.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, IKU Persentase Penyelesaian Rencana NSPK Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP masih mencatat capaian 0% karena merupakan indikator yang diukur berdasarkan penyelesaian dokumen pada akhir tahun. Meskipun demikian, seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai rencana, mulai dari pengumpulan data, penyusunan substansi, koordinasi, hingga pembahasan teknis. Dengan progres tersebut, penyelesaian NSPK tetap diproyeksikan dapat memenuhi target pada akhir Tahun 2026.



11. ISK 3.1.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Dit. PSP (Indeks)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) merupakan ukuran terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Cakupan pengukuran indeks ini meliputi empat aspek utama:

- Kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan jabatan;
- Kompetensi teknis dan manajerial (sertifikasi, pelatihan, dan uji kompetensi);
- Kinerja ASN, baik dari aspek perencanaan hingga pelaporan individu; dan
- Disiplin dan etika aparatur yang tercermin dari ketertiban administratif dan budaya kerja.

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat PSP digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan aspek kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Apabila target indikator telah tercapai, hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Direktorat PSP berjalan dengan baik melalui peningkatan kompetensi pegawai, pengelolaan kinerja yang terukur, serta pembinaan disiplin dan pengembangan karier secara berkelanjutan. Profesionalitas ASN yang baik menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan serta pencapaian sasaran strategis Direktorat PSP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.61. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Dit. PSP (Indeks)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	0	0	81,50	88,39	-	-	-	-

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) memperoleh realisasi sebesar 88,39 dari target 81,50, sehingga mencapai 108,45%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat PSP telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan sumber daya manusia yang baik, yang didukung oleh peningkatan kompetensi pegawai, pemenuhan aspek kualifikasi, pengelolaan kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penerapan disiplin ASN sesuai ketentuan. Pencapaian ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PSP secara efektif, profesional, dan akuntabel.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.62. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	81,50	88,39	108,45%

Sebagai direktorat yang baru terbentuk, data historis lima tahun belum tersedia secara lengkap. Namun demikian, Direktorat PSP terus mendorong peningkatan profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas pengelolaan kinerja individu, serta pemenuhan persyaratan pengembangan karier.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan indeks menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan SDM yang semakin mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.63. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
81,85	88,39	108,45%

Pencapaian indikator profesionalitas ASN merupakan bagian dari sasaran Renstra Direktorat PSP dalam membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Nilai indeks menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian target organisasi secara keseluruhan.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.64. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	81,50
Realisasi	88,39

Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui ketentuan mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Perbandingan dengan benchmark nasional menunjukkan tingkat profesionalitas ASN Direktorat PSP dalam aspek kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Hasil pengukuran menjadi dasar dalam penyusunan program pengembangan SDM yang lebih efektif dan berkelanjutan.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

- 1) pelaksanaan manajemen kinerja ASN secara konsisten;
- 2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) pembinaan disiplin pegawai;
- 4) pemanfaatan aplikasi kinerja dan kepegawaian;
- 5) dukungan pimpinan terhadap pengembangan SDM.

Kendala

Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi:

- 1) keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi bagi sebagian pegawai;
- 2) perlunya peningkatan pemenuhan jam pelatihan sesuai ketentuan;
- 3) proses pembaruan data kepegawaian yang harus dilakukan secara berkala;
- 4) masih adanya variasi tingkat kompetensi sesuai bidang tugas.

Upaya Perbaikan

Upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) meningkatkan partisipasi pegawai dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
- 2) memperkuat pembinaan disiplin dan budaya kerja;
- 3) meningkatkan kualitas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 4) melakukan pemutakhiran data ASN pada sistem kepegawaian secara berkala;
- 5) menyusun rencana pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan profesionalitas ASN didukung melalui pemanfaatan anggaran operasional, pengembangan kompetensi, pembinaan pegawai, dan kegiatan manajemen SDM. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan secara efisien melalui kombinasi pelatihan daring,



pembelajaran internal (*knowledge sharing*), bimbingan teknis, serta pendampingan dalam pelaksanaan tugas. Pendekatan tersebut memungkinkan peningkatan kapasitas ASN dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.65. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Pengelolaan Kinerja Pegawai	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja ASN.
Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme pegawai.
Pembinaan Disiplin dan Etika ASN	Mendorong kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai	Memastikan pencapaian target individu dan organisasi.
Pengelolaan Data Kepegawaian	Mendukung akurasi penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat PSP merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Peningkatan nilai indeks akan berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola organisasi, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. Ke depan, Direktorat PSP akan terus memperkuat pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, dan pembinaan ASN agar mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara berkelanjutan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat PSP belum memiliki target capaian yang ditetapkan secara triwulanan (bersifat tahunan). Meskipun demikian, upaya

peningkatan profesionalitas ASN tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pencapaian target akhir tahun.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi melalui platform PSKP SMART, yang dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran mandiri dan peningkatan kapasitas ASN. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan dan pembelajaran yang relevan dengan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Direktorat PSP.

Dari sisi kinerja, meskipun belum terdapat pengukuran kuantitatif pada Triwulan II, pelaksanaan pelatihan ini merupakan leading indicator yang berkontribusi positif terhadap pembentukan nilai Indeks Profesionalitas ASN pada akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa proses bisnis peningkatan kompetensi telah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan.

Faktor Pendukung:

- 1) Ketersediaan platform digital (PSKP SMART) yang memudahkan akses pelatihan;
- 2) Komitmen pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi secara mandiri;
- 3) Dukungan kebijakan pengembangan SDM berbasis kompetensi.

Faktor Penghambat:

- 1) Belum adanya target dan pengukuran antara (milestone) pada Triwulan II;
- 2) Monitoring dan evaluasi partisipasi pelatihan belum sepenuhnya terintegrasi secara real-time.

Meskipun target indikator belum ditetapkan pada Triwulan II, kegiatan pendukung berupa pelatihan melalui PSKP SMART tetap dilaksanakan sebagai bentuk mitigasi risiko tidak tercapainya target tahunan. Dengan demikian, kondisi ini tidak menunjukkan deviasi kinerja, melainkan



merupakan karakteristik indikator yang bersifat tahunan dengan progres capaian yang dibangun sejak awal tahun.

12. ISK 3.1.2 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (nilai)

Pada tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) melaksanakan proses penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi. Penilaian ini dilakukan secara internal dengan mengacu pada komponen-komponen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja.

Sebagai direktorat yang relatif baru terbentuk, penilaian mandiri SAKIP Dit. PSP menjadi penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam siklus manajemen kinerja. Hasil penilaian mandiri tahun 2026 menunjukkan bahwa Dit. PSP memperoleh nilai 88,50, yang masuk dalam kategori “A”. Nilai ini mencerminkan bahwa proses perencanaan kinerja sudah mulai terintegrasi dengan penganggaran, dan pelaporan kinerja mulai mengarah pada prinsip keterukuran dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.66. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (nilai)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	88,20	88,50

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan memperoleh nilai 88,50, melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,20, sehingga mencapai 100,34%. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat PSP telah berjalan dengan baik pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta pencapaian kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP. Nilai yang melampaui target tersebut mencerminkan komitmen Direktorat PSP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented*), sekaligus menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.67. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	84,00	78,99	90%
2026	88,20	88,50	100%

Sebagai direktorat yang baru dibentuk, Direktorat PSP belum memiliki data historis lima tahun secara lengkap. Namun demikian, nilai Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2026 menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola kinerja melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, penguatan pengukuran kinerja berbasis indikator, peningkatan kualitas pelaporan, serta pelaksanaan evaluasi internal secara lebih sistematis.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.68. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
88,20	88,39	100,34%

Realisasi nilai SAKIP telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja telah berjalan sesuai arah kebijakan organisasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.69. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	88,20
Realisasi	88,50

Benchmark

Nilai sebesar 88,50 menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Direktorat PSP telah memenuhi bahkan melampaui target organisasi. Capaian ini mencerminkan penerapan prinsip manajemen kinerja yang baik, terutama pada aspek keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan sasaran strategis organisasi.

- 2) Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- 4) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan reviu Inspektorat.
- 5) Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan budaya kinerja.

Kendala

- 1) Direktorat PSP sebagai unit organisasi yang relatif baru masih memiliki keterbatasan data historis untuk mendukung evaluasi jangka panjang.
- 2) Masih diperlukan peningkatan kualitas eviden pada beberapa komponen penilaian SAKIP.
- 3) Perlu penguatan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Upaya Perbaikan

- 1) Meningkatkan kualitas cascading kinerja hingga tingkat individu.
- 2) Memperkuat keterkaitan antara IKU, program, kegiatan, dan anggaran.
- 3) Melaksanakan evaluasi internal secara berkala serta memastikan tindak lanjut atas setiap rekomendasi.
- 4) Mengembangkan inovasi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis digital.
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan coaching implementasi SAKIP.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian nilai SAKIP didukung oleh optimalisasi sumber daya organisasi melalui koordinasi lintas tim, penguatan fungsi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja.



Analisis

Peningkatan nilai SAKIP tidak hanya didukung oleh penggunaan anggaran, tetapi juga melalui optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan aplikasi pengelolaan kinerja, serta sinergi antarunit dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Pendekatan tersebut memungkinkan peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara efisien tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.70. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Menjamin keterkaitan antara sasaran strategis, IKU, program, dan kegiatan.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Mengukur capaian indikator dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.
Penyusunan LKjIP dan Laporan Kinerja Berkala	Meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas organisasi.
Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi	Memastikan implementasi perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP.
Bimbingan Teknis dan Coaching SAKIP	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penerapan manajemen kinerja berbasis hasil.

Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan memperoleh nilai 88,50, melampaui target 88,20 dengan capaian 100,34%. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Direktorat PSP telah berjalan secara efektif dan konsisten, didukung oleh perencanaan yang selaras, pengukuran kinerja yang terstruktur, pelaporan yang berkualitas, serta evaluasi internal yang berkelanjutan. Ke depan, Direktorat PSP akan terus memperkuat budaya kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.



13. ISK 3.1.3 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Dit. PSP (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan *input* dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui *Form* Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui *Form* Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.71. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Dit. PSP (%)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	100	100	100	100	100	-	100	-

Pada Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi objek pengendalian telah menerapkan prinsip manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Implementasi tersebut mencakup proses identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, penyusunan langkah mitigasi, pelaksanaan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.72. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	100	100	100%
2026	100	100	100%

Penerapan manajemen risiko pada Tahun 2026 telah dilaksanakan secara konsisten pada seluruh kegiatan prioritas Direktorat PSP. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengelolaan risiko semakin terintegrasi dengan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.



c. **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)**

Tabel 3.73. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
100	100	100%

d. **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark**

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.74. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	100
Realisasi	100

Benchmark

Pelaksanaan indikator mengacu pada ketentuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pedoman manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengendalian berbasis manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai target organisasi. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dalam pengelolaan program dan kegiatan, sehingga potensi hambatan terhadap pencapaian sasaran organisasi dapat diantisipasi sejak awal.

e. **Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja**

Faktor Keberhasilan

- 1) Komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen risiko pada seluruh kegiatan.
- 2) Tersusunnya register risiko dan rencana tindak pengendalian.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi risiko secara berkala.

- 4) Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- 5) Koordinasi yang baik antarunit dalam pelaksanaan pengendalian intern.

Kendala

Walaupun target telah tercapai, masih terdapat beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan, antara lain:

- 1) penyempurnaan dokumentasi eviden pelaksanaan pengendalian risiko;
- 2) peningkatan kapasitas pegawai dalam penerapan manajemen risiko;
- 3) penyesuaian register risiko terhadap dinamika pelaksanaan program strategis.

Upaya Perbaikan

- 1) Melakukan reviu register risiko secara berkala.
- 2) Meningkatkan kualitas monitoring efektivitas pengendalian.
- 3) Memperkuat pemanfaatan hasil evaluasi risiko dalam penyusunan program dan anggaran.
- 4) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen risiko.
- 5) Mengintegrasikan pengendalian risiko dengan evaluasi kinerja organisasi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui koordinasi internal, monitoring, evaluasi, dan penguatan fungsi pengendalian tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Keberhasilan mencapai target 100% menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah terintegrasi dalam mekanisme kerja Direktorat PSP. Optimalisasi peran unit kerja, pemanfaatan forum monitoring dan evaluasi, serta penggunaan dokumen register risiko memungkinkan pengendalian kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa menambah beban sumber daya secara signifikan.



g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.75. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Penyusunan Register Risiko Direktorat PSP	Mengidentifikasi dan memetakan risiko strategis serta operasional.
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko	Memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian dan mitigasi risiko.
Evaluasi SPIP dan Pengendalian Internal	Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas organisasi.
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian	Menetapkan langkah mitigasi terhadap risiko yang teridentifikasi.
Monitoring Program Strategis Direktorat PSP	Memastikan risiko pada pelaksanaan program dapat dikendalikan secara berkelanjutan.

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP berhasil mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh proses pengendalian berbasis risiko telah diterapkan secara konsisten pada pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PSP. Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat tata kelola organisasi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) telah melaksanakan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko secara menyeluruh dengan capaian 100% dari target.

Pada periode ini, Dit. PSP merancang dan mengimplementasikan 6 dokumen Manajemen Risiko (MR) yang seluruhnya difokuskan pada



kegiatan strategis dalam kerangka proyek *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS). Dokumen MR tersebut mencakup aspek pengadaan kapal pengawas, pembangunan prasarana, pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengawasan, serta sarana teknologi seperti drone dan transmisi data. Setiap MR telah melalui tahapan:

- 1) Identifikasi risiko terhadap sasaran dan proses kegiatan;
- 2) Analisis dan evaluasi risiko berdasarkan probabilitas dan dampak;
- 3) Penyusunan rencana mitigasi risiko; dan
- 4) Pemantauan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan mitigasi.

Secara kuantitatif, capaian tersebut mencerminkan kinerja yang sangat baik (on track), namun demikian secara kualitatif masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pengukuran capaian masih didasarkan pada kesesuaian antara rencana dan realisasi pengendalian serta kelengkapan dokumen pemantauan, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas pengendalian dalam menurunkan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan demikian, capaian 100% lebih merepresentasikan terpenuhinya aspek administratif (*compliance*) dibandingkan dengan efektivitas pengendalian (*outcome*).

Faktor pendukung utama keberhasilan capaian ini antara lain adanya regulasi yang jelas terkait penerapan manajemen risiko, komitmen pimpinan dan unit kerja dalam melaksanakan pengendalian, serta mekanisme pemantauan berkala melalui pelaporan triwulanan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain efektivitas pengendalian yang belum optimal, keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan seluruh rencana pengendalian, serta kualitas pelaporan SPIP yang belum sepenuhnya memadai baik dari sisi substansi maupun standarisasi. Selain itu, validitas data yang digunakan masih sangat bergantung pada *self-assessment* masing-masing unit kerja.

Dalam perspektif pengawasan dan audit, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko overstatement capaian kinerja apabila tidak didukung



oleh bukti yang memadai terkait efektivitas pelaksanaan pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek verifikasi dan validasi data, peningkatan kualitas dokumentasi evidence, serta keterkaitan yang lebih kuat antara pelaksanaan pengendalian dengan mitigasi risiko yang dihadapi.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat PSP perlu mendorong peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko dari yang semula berorientasi pada pemenuhan administrasi (*compliance-based*) menjadi berorientasi pada efektivitas (*effectiveness-based*), memperkuat monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut risiko residual, serta melakukan standarisasi dan peningkatan kualitas pelaporan SPIP. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga mampu mencerminkan kualitas pengendalian risiko yang andal, efektif, dan akuntabel.

14. ISK 3.1.4 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Dit. PSP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. PSP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Realisasi atas indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.76. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	86	100	86	100	86	-	86	-

Pada Tahun 2026, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan berhasil menyelesaikan 100% dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sesuai target yang ditetapkan. Seluruh rekomendasi yang menjadi kewenangan Direktorat PSP telah ditindaklanjuti melalui penyusunan dokumen pendukung yang lengkap dan penyampaiannya kepada unit pengawas sesuai ketentuan.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Direktorat PSP dalam memperkuat akuntabilitas, kepatuhan terhadap hasil pengawasan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelesaian tindak lanjut secara tepat waktu juga menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan terhadap proses bisnis dan pengelolaan organisasi.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.77. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	86	100	116,28%
2026	86	100	116,28%

Sebagai direktorat yang relatif baru, Direktorat PSP terus memperkuat mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan melalui monitoring berkala dan koordinasi dengan Inspektorat maupun unit terkait. Pada Tahun 2026 seluruh rekomendasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat PSP telah dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.78. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
86	100	116,28%

Realisasi indikator telah memenuhi target Renstra Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat PSP mampu menjaga konsistensi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern dan peningkatan akuntabilitas organisasi.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.79. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau *Benchmark*

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	86
Realisasi	100

Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian sebesar 100%

menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan kepatuhan Direktorat PSP terhadap mekanisme pengawasan internal serta komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

- 1) Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Monitoring berkala terhadap status penyelesaian rekomendasi.
- 3) Koordinasi yang baik dengan Inspektorat Jenderal dan unit terkait.
- 4) Kelengkapan dokumen pendukung sebagai eviden tindak lanjut.
- 5) Penetapan penanggung jawab yang jelas untuk setiap rekomendasi.

Kendala

Walaupun seluruh target telah tercapai, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus diperkuat, antara lain:

- 1) menjaga konsistensi kualitas dokumen tindak lanjut;
- 2) memastikan penyampaian eviden dilakukan secara tepat waktu;
- 3) meningkatkan kecepatan koordinasi apabila rekomendasi melibatkan lebih dari satu unit kerja.

Upaya Perbaikan

- 1) Melakukan monitoring berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi.
- 2) Memperkuat mekanisme pengendalian internal atas tindak lanjut hasil pengawasan.
- 3) Meningkatkan kualitas dokumentasi dan pengarsipan eviden.
- 4) Mengoptimalkan koordinasi dengan unit pengawas dan unit teknis.
- 5) Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyelesaian tindak lanjut.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, tanpa memerlukan anggaran khusus. Kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan mekanisme koordinasi internal, monitoring, evaluasi, dan pengelolaan dokumen secara terintegrasi. Penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pengawasan menunjukkan bahwa Direktorat PSP mampu mengoptimalkan sumber daya manusia dan proses administrasi secara efektif. Dengan memanfaatkan sistem monitoring internal dan koordinasi lintas unit, seluruh dokumen tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai target tanpa penambahan sumber daya yang signifikan.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.80. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Memantau progres penyelesaian rekomendasi secara berkala.
Koordinasi dengan Inspektorat dan Unit Terkait	Memastikan kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pengawasan.
Penyusunan dan Verifikasi Dokumen Eviden	Menjamin kelengkapan dokumen pendukung sebelum disampaikan kepada unit pengawas.
Evaluasi Internal	Mengidentifikasi hambatan dan mempercepat penyelesaian rekomendasi.
Pengendalian Administrasi dan Arsip	Menjamin ketertelusuran dokumen tindak lanjut sebagai bentuk akuntabilitas.

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan berhasil mencapai 100% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi secara tepat waktu, lengkap, dan terdokumentasi dengan baik. Selain memperkuat akuntabilitas dan



kepatuhan terhadap hasil pengawasan, pencapaian ini juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui penerapan prinsip transparansi, pengendalian internal, dan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja pada lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan hasil yang **sangat optimal**, yaitu sebesar 100%, dengan total 13 rekomendasi telah ditindaklanjuti seluruhnya (tuntas 13 dari 13 rekomendasi).

Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara tuntas (fully compliant), sehingga tidak terdapat temuan yang berpotensi menjadi risiko berulang, serta mencerminkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Ditjen PSDKP.

15. ISK 3.1.5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)

Indikator *Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP* merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan unit kerja. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana pengelolaan arsip telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung akuntabilitas kinerja organisasi.

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi nilai, mengingat pelaksanaan pengawasan kearsipan internal belum dijadwalkan pada periode tersebut. Meskipun demikian, Direktorat PSP tetap melaksanakan berbagai langkah persiapan sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola kearsipan, antara lain melalui penataan arsip aktif, pembenahan administrasi kearsipan, serta peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengelolaan arsip yang baik dan benar.



a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.81. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSP (nilai)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	81	-

Indikator *Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP* ditetapkan dengan target tahunan sebesar 81, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan yang berlaku. Nilai ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas tata kelola arsip serta dukungannya terhadap akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi.

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi, mengingat pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal belum dijadwalkan pada periode tersebut. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahap ini masih bersifat *on track* terhadap perencanaan tahunan dan tidak menunjukkan deviasi, karena belum memasuki fase pengukuran.

Secara umum, meskipun belum terdapat capaian nilai pada awal tahun, upaya yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Direktorat PSP dalam memperkuat sistem kearsipan sebagai bagian integral dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.82. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	81	-	-

Sebagai unit kerja yang relatif baru, Direktorat PSP terus melakukan penguatan tata kelola kearsipan melalui penataan arsip aktif, penyusunan klasifikasi arsip, penerapan tata naskah dinas, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan kearsipan. Upaya tersebut menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang lebih tertib dan mendukung peningkatan kualitas administrasi organisasi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.83. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
81	-	120%

Belum ada perbandingan realisasi indikator yang memenuhi target Renstra Tahun 2026. Tapi pengelolaan arsip telah menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola organisasi dan mendukung pelaksanaan tugas Direktorat PSP secara efektif, efisien, dan akuntabel.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.84. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	81
Realisasi	-

Benchmark

Penilaian mengacu pada ketentuan pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan berdasarkan regulasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan kebijakan kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencapaian nilai 100 menunjukkan bahwa pengelolaan arsip

di Direktorat PSP telah memenuhi standar pengawasan kearsipan internal yang ditetapkan organisasi. Pengelolaan arsip yang tertib memberikan dukungan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan penyediaan informasi dan dokumen sebagai bahan pengambilan keputusan.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Keberhasilan

- 1) Komitmen pimpinan dalam meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan.
- 2) Penerapan tata naskah dinas dan klasifikasi arsip secara konsisten.
- 3) Koordinasi yang baik dengan unit pengelola kearsipan.
- 4) Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip secara berkala.
- 5) Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya pengelolaan arsip.

Kendala

Walaupun target telah tercapai, beberapa aspek masih perlu terus ditingkatkan, antara lain:

- 1) percepatan digitalisasi arsip;
- 2) peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip;
- 3) penyempurnaan sistem penyimpanan arsip elektronik;
- 4) peningkatan kualitas pengamanan arsip vital.

Upaya Perbaikan

- 1) Melakukan digitalisasi arsip secara bertahap.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola arsip melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- 3) Melaksanakan monitoring dan audit internal kearsipan secara berkala.
- 4) Menyempurnakan pengelolaan arsip elektronik sesuai perkembangan teknologi.
- 5) Memperkuat koordinasi dengan unit kearsipan kementerian.



f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan sarana penyimpanan arsip, sistem administrasi perkantoran, serta koordinasi antar unit tanpa memerlukan anggaran yang besar.

Keberhasilan mencapai target menunjukkan bahwa Direktorat PSP mampu mengelola fungsi kearsipan secara efisien melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang tersedia. Integrasi pengelolaan arsip dengan administrasi perkantoran juga meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.85. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Penataan Arsip Aktif dan Inaktif	Menjamin tertib pengelolaan arsip sesuai klasifikasi.
Pengelolaan Tata Naskah Dinas	Meningkatkan kualitas administrasi dan penciptaan arsip.
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan arsip.
Digitalisasi Arsip	Mendukung kemudahan akses dan keamanan dokumen.
Pembinaan Pengelola Arsip	Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kearsipan.

Meskipun belum terdapat realisasi nilai, Direktorat PSP telah melaksanakan berbagai langkah persiapan sebagai bentuk mitigasi risiko dan upaya pencapaian target, antara lain melalui penataan arsip aktif, pembenahan sistem administrasi kearsipan, serta penguatan pemahaman SDM terkait pengelolaan arsip sesuai ketentuan. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan kearsipan pada periode berikutnya.

16. ISK 3.1.6 Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP

Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP merupakan ukuran kinerja yang mencerminkan kemampuan unit kerja dalam menghasilkan serta mengimplementasikan inovasi yang memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan. Inovasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengembangan aplikasi berbasis teknologi, tetapi juga mencakup penyederhanaan proses bisnis, peningkatan metode kerja, serta terobosan kebijakan yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi layanan.

Dalam pelaksanaannya, capaian indikator ini sangat ditentukan oleh komitmen unit kerja dalam mengidentifikasi kebutuhan layanan yang perlu ditingkatkan serta kemampuan dalam merumuskan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan secara nyata. Pada tahap awal periode pelaporan, khususnya Triwulan II, capaian indikator umumnya belum menunjukkan hasil yang signifikan secara kuantitatif, mengingat sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap perencanaan, penyusunan konsep inovasi, serta pengembangan awal. Namun demikian, berbagai aktivitas seperti rapat koordinasi, penyusunan desain inovasi, pengembangan sistem, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan telah menjadi bagian dari proses pencapaian kinerja.

Dari sisi faktor yang memengaruhi, terdapat beberapa aspek pendukung antara lain adanya dorongan kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta komitmen pimpinan dalam mendorong budaya inovasi. Di sisi lain, masih terdapat kendala berupa belum meratanya pemahaman terkait inovasi pelayanan publik, keterbatasan dalam dokumentasi dan pelaporan inovasi sebagai *evidence* kinerja, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi.

Untuk memastikan capaian indikator dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, diperlukan langkah strategis berupa penguatan pembinaan inovasi di masing-masing unit kerja, pengembangan inovasi yang berorientasi pada hasil dan manfaat, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan pelaporan. Dengan demikian, inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif,



tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Direktorat PSP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.86. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	78	-

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai Inovasi Pengawasan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP belum memperoleh capaian karena proses penilaian inovasi belum dilaksanakan. Penilaian terhadap inovasi dilakukan setelah seluruh tahapan pengembangan, implementasi, dan evaluasi inovasi selesai sesuai jadwal yang ditetapkan pada akhir tahun.

Meskipun nilai capaian masih **0%**, Direktorat PSP telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan, antara lain penyusunan konsep inovasi, pengembangan mekanisme implementasi, pengumpulan eviden pendukung, serta penyempurnaan inovasi yang akan diusulkan dalam penilaian. Oleh karena itu, belum adanya capaian pada Semester I tidak menunjukkan rendahnya kinerja, melainkan karena karakteristik indikator yang hanya dapat diukur setelah proses penilaian selesai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.87. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	78	-	-

Indikator ini merupakan indikator yang pencapaiannya bergantung pada hasil penilaian inovasi yang dilaksanakan pada akhir tahun. Oleh karena itu, realisasi Semester I belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan. Namun, proses pengembangan inovasi tetap berjalan sesuai rencana sebagai persiapan menghadapi penilaian.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.88. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
78	-	-

Target Renstra direncanakan tercapai pada akhir Tahun 2026 setelah proses penilaian inovasi selesai. Selama Semester I, Direktorat PSP memfokuskan pelaksanaan pada pengembangan inovasi, penyempurnaan implementasi, serta penyediaan dokumen pendukung sebagai dasar penilaian.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.89. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	78
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat hasil penilaian yang dapat dibandingkan dengan target organisasi karena proses evaluasi inovasi belum dilaksanakan. Penilaian akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan substansi inovasi dipenuhi sesuai mekanisme yang berlaku.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

- 1) Tersedianya komitmen pimpinan dalam pengembangan inovasi.
- 2) Proses identifikasi kebutuhan inovasi telah dilakukan.
- 3) Penyusunan eviden dan dokumentasi inovasi terus dipersiapkan.
- 4) Koordinasi antarunit dalam penyempurnaan inovasi berjalan dengan baik.

Kendala

- 1) Penilaian inovasi belum dilaksanakan sehingga belum terdapat nilai capaian.
- 2) Penyempurnaan eviden masih berlangsung.
- 3) Beberapa tahapan implementasi inovasi masih dalam proses.

Upaya Perbaikan

- 1) Menyelesaikan implementasi inovasi sesuai jadwal.
- 2) Melengkapi dokumen pendukung dan eviden penilaian.
- 3) Melakukan evaluasi internal sebelum penilaian resmi.
- 4) Memastikan inovasi memberikan manfaat yang terukur terhadap peningkatan kinerja organisasi.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Semester I, sumber daya dimanfaatkan untuk pengembangan konsep inovasi, penyusunan dokumen, koordinasi, dan implementasi awal tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Pendekatan ini menjadi dasar untuk memastikan inovasi siap dinilai pada akhir tahun.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.90. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Pengembangan inovasi Direktorat PSP	Menyusun dan menyempurnakan inovasi yang akan dinilai.
Penyusunan dokumen dan eviden inovasi	Memenuhi persyaratan administrasi penilaian.

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Monitoring implementasi inovasi	Memastikan inovasi berjalan sesuai rencana.
Evaluasi internal inovasi	Mengidentifikasi perbaikan sebelum penilaian akhir.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, IKU Nilai Inovasi Pengawasan Publik yang Diterapkan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSP masih mencatat capaian 0% karena proses penilaian inovasi belum dilaksanakan dan dijadwalkan pada akhir tahun. Meskipun demikian, Direktorat PSP telah melaksanakan tahapan pengembangan inovasi, penyempurnaan implementasi, serta penyiapan dokumen pendukung sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses penilaian. Dengan progres tersebut, target nilai inovasi pada akhir Tahun 2026 tetap diupayakan dapat tercapai sesuai rencana.

17. ISK 3.1.7 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Implementasi budaya kerja Ditjen PSDKP mengacu pada beberapa dasar hukum yaitu Kepmen-KP SJ nomor 141 tahun 2019 tentang Budaya Kerja Ditjen. PSDKP yang menetapkan nilai utama, Kepmen-KP SJ nomor 144 tahun 2019 tentang Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP dan Kepdirjen nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Monev.

Lebih lanjut, Program Budaya Kerja merupakan upaya Ditjen PSDKP dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional. Program budaya kerja terdiri dari (1) Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); (2) Lima Menit Sebelum Jadwal; (3) 5R (Ringkas, Rapi, resik, Rawat dan Rajin); (4) Upayakan Data terkini; (5) Organisasikan Rapat, Cepat, Aksi dan Arsipkan; (6) Tegakkan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (7) Belanjakan Anggaran Secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (8) Aparatur Sipil Negara PSDKP Produktif Kerja; (9) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (10) hargai, Motivasi dan Inisiatif (11) Gelorakan Gerakan Hemat Energi (*Go Green*). Setiap Unit Kerja dilingkungan Ditjen PSDKP wajib melaksanakan 11 program budaya kerja. Untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan budaya kerja dilaksanakan penilaian implementasi budaya kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

budaya kerja. LKE Budaya Kerja dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Kerja dan diverifikasi oleh Komite Budaya Kerja Ditjen PSDKP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.91. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2026

Indikator Kinerja	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)							
	TW I		TW II		TW III		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2026	-	-	-	-	-	-	71	-

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja belum memperoleh capaian karena proses penilaian implementasi budaya kerja belum dilaksanakan dan dijadwalkan pada akhir tahun. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil implementasi nilai-nilai budaya kerja, pemenuhan eviden, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada masing-masing unit kerja.

Meskipun capaian masih 0%, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung implementasi budaya kerja, antara lain internalisasi nilai-nilai organisasi, pembinaan disiplin pegawai, penguatan budaya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK), serta peningkatan komitmen pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi. Oleh karena itu, belum adanya nilai capaian pada Semester I disebabkan karena proses evaluasi belum dilakukan, bukan karena belum dilaksanakannya program budaya kerja.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya dan Tren Lima Tahun Terakhir

Tabel 3.92. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-
2025	-	-	-
2026	71	-	-



Indikator ini merupakan indikator tahunan yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan hasil evaluasi implementasi budaya kerja pada akhir tahun. Selama Semester I, Direktorat PSP telah melaksanakan berbagai kegiatan internalisasi budaya kerja sebagai persiapan menghadapi proses penilaian.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Tabel 3.93. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah (Renstra)

Target Renstra 2026	Realisasi	Persentase
71	-	-

Target Renstra direncanakan tercapai pada akhir Tahun 2026 setelah pelaksanaan evaluasi budaya kerja. Selama Semester I, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan implementasi nilai-nilai budaya kerja dan penyediaan dokumen pendukung sebagai eviden penilaian.

d. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark yang digunakan adalah target internal Ditjen PSDKP

Tabel 3.94. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan/atau Benchmark

Benchmark	Nilai
Target Organisasi	71
Realisasi	-

Benchmark

Belum terdapat hasil penilaian yang dapat dibandingkan dengan target organisasi karena proses evaluasi implementasi budaya kerja belum dilaksanakan. Hasil penilaian akan diperoleh setelah seluruh tahapan evaluasi selesai pada akhir tahun.

e. Analisis Keberhasilan, Kendala, dan Upaya Perbaikan Kinerja

Faktor Pendukung

- 1) Komitmen pimpinan dalam penerapan budaya kerja.
- 2) Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai.
- 3) Penguatan disiplin dan etika kerja.
- 4) Dukungan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Kendala

- 1) Penilaian implementasi budaya kerja belum dilaksanakan.
- 2) Eviden pelaksanaan program masih dalam proses penyempurnaan.
- 3) Pengukuran dampak implementasi budaya kerja baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Upaya Perbaikan

- 4) Meningkatkan konsistensi penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Melengkapi eviden implementasi budaya kerja.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala.
- 7) Memperkuat sosialisasi dan pembinaan budaya kerja kepada seluruh pegawai.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Implementasi program budaya kerja dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, terutama melalui pembinaan internal, rapat koordinasi, kegiatan sosialisasi, dan monitoring pelaksanaan budaya kerja tanpa memerlukan anggaran khusus yang besar.

Pelaksanaan program budaya kerja memanfaatkan sumber daya manusia dan mekanisme pembinaan yang telah tersedia sehingga implementasinya dapat berjalan secara efisien. Pendekatan ini mendukung terbentuknya budaya organisasi yang positif tanpa menambah beban penggunaan sumber daya secara signifikan.

g. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Tabel 3.95. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan	Kontribusi terhadap IKU
Internalisasi Nilai BerAKHLAK	Meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya kerja ASN.
Pembinaan Disiplin Pegawai	Mendorong kepatuhan terhadap norma dan etika kerja.
Monitoring Implementasi Budaya Kerja	Memastikan penerapan budaya kerja berjalan secara konsisten.
Evaluasi Internal	Menilai kesiapan unit kerja dalam menghadapi penilaian budaya kerja.
Penguatan Reformasi Birokrasi	Mendukung terbentuknya budaya organisasi yang profesional dan berorientasi pada hasil.

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian kinerja untuk indikator Nilai Implementasi Program Budaya Kerja belum dapat diukur karena belum terdapat realisasi penilaian. Hal ini umumnya disebabkan oleh karakteristik indikator yang berbasis evaluasi periodik (*assessment*), yang pelaksanaannya dilakukan pada periode tertentu (semesteran atau tahunan), sehingga belum menghasilkan output nilai pada awal tahun.

Meskipun demikian, berbagai upaya pendukung implementasi Program Budaya Kerja tetap telah dilaksanakan pada Triwulan II, seperti sosialisasi nilai-nilai budaya kerja, internalisasi core values, serta penguatan komitmen pegawai melalui kegiatan pembinaan dan rapat internal. Kegiatan-kegiatan ini merupakan tahapan awal yang penting dalam membangun fondasi budaya kerja yang efektif, namun belum dapat dikonversi menjadi nilai kinerja pada periode pelaporan ini.

Dari sisi evaluasi, kondisi belum adanya realisasi pada Triwulan II tidak serta-merta menunjukkan kinerja yang rendah, melainkan lebih pada belum masuknya periode pengukuran. Namun demikian, terdapat risiko

keterlambatan pencapaian target apabila pelaksanaan program tidak terencana dengan baik pada triwulan berikutnya, khususnya terkait pemenuhan eviden dan kesiapan unit kerja dalam menghadapi proses penilaian.

Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan penyusunan rencana aksi yang lebih terstruktur dan terukur, termasuk penjadwalan kegiatan implementasi budaya kerja, monitoring berkala, serta pengumpulan dokumen dukung secara sistematis. Selain itu, penguatan peran pimpinan dalam mendorong konsistensi penerapan budaya kerja di lingkungan unit kerja menjadi faktor kunci dalam mencapai target nilai sebesar 71 pada akhir tahun.

3.3. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP. Efisiensi sumber daya pada Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) Tahun 2026 dilakukan optimalisasi penggunaan anggaran dan pengendalian belanja operasional agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif sesuai target kinerja yang telah ditetapkan melalui:

- a. Penghematan pada komponen belanja yang tidak bersifat prioritas, pengendalian penggunaan bahan operasional, serta penyesuaian kebutuhan belanja barang dan jasa berdasarkan skala prioritas kegiatan.
- b. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi. Pemanfaatan aplikasi collaboration office (www.portal.kkp.go.id) dalam korespondensi, sehingga menghemat biaya cetak dokumen dan memangkas waktu disposisi dari pimpinan kepada pegawai.
- c. Optimalisasi penggunaan media daring (Zoom Meeting) untuk rapat, supervisi, sosialisasi lingkup Ditjen PSDKP. Penggunaan media daring sangat bermanfaat karena dapat melibatkan seluruh UPT dan pegawai Ditjen PSDKP dalam waktu yang sama.
- d. Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat bagi pegawai. Penerapan WFA tersebut mendukung efisiensi penggunaan



fasilitas kantor, seperti pengurangan biaya operasional perkantoran, penggunaan listrik, air, dan kebutuhan penunjang lainnya, tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan efisiensi dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan pencapaian kinerja organisasi. Penghematan sumber daya yang dilakukan tidak berdampak terhadap pencapaian target kinerja Direktorat PSP, melainkan menjadi langkah strategis dalam memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal, tepat sasaran, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

3.4. Akuntabilitas keuangan

Pagu efektif Dit. PSP Tahun 2026 tercatat sebesar Rp1.112.159.700.000. Sampai dengan bulan Juni 2026, realisasi anggaran mencapai Rp790.809.893 atau sekitar 0,04% dari total pagu, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.111.639.897.363 atau 99,96% dari total pagu yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada Semester I masih sangat rendah dibandingkan dengan total pagu yang dikelola.

Sampai bulan Mei 2026 terjadi tren peningkatan penyerapan anggaran yang cukup positif. Persentase realisasi meningkat secara bertahap dari 0% pada Januari menjadi 29,34% pada Mei. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan mulai berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pada bulan Juni 2026 terjadi penurunan drastis persentase realisasi menjadi 0,04%. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya realisasi anggaran, melainkan karena adanya penambahan pagu anggaran yang sangat signifikan, khususnya untuk kegiatan MFISS, sebesar kurang lebih Rp1,110 triliun, sehingga basis perhitungan persentase realisasi meningkat secara drastis.

Anggaran	Jumlah	
Pagu Efektif	Rp	1.112.159.700.000,00
Realisasi	Rp	790.809.893,00
Sisa Anggaran	Rp	1.111.639.897.363,00





Gambar 3.5. Realiasasi Anggaran Dit. PSP s.d TW II Tahun 2026

Kondisi ini mengharuskan penyesuaian kembali terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), jadwal pelaksanaan kegiatan, serta proses pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Selain itu, sebagian besar kegiatan strategis masih berada pada tahap persiapan, penyusunan dokumen, dan proses kontraktual sehingga belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan anggaran tetap terkendali karena seluruh alokasi dan realisasi dapat dipantau secara berkala melalui mekanisme monitoring. Namun demikian, diperlukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi antar unit, serta pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan target penyerapan anggaran dan capaian kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara efektif dan tepat waktu.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

04. Penutup

Laporan Kinerja
Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan

Triwulan II Tahun 2026



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BerAKHLAK

Garansi Politanan Aklintabal Komptan
Harmonis Laval Addgtti Kolabonatif

BAB IV PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Atas hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja Triwulan II tahun 2026 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Direktorat PSP memperoleh NKO sebesar 108,18%, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja organisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh beberapa indikator yang berhasil mencapai atau melebihi target, antara lain Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas (110,16%), Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Kriteria Teknis Sarana Pengawasan SDKP (120%), Nilai Kualitas Rancangan Standardisasi Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan SDKP (100%), Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko (100%), Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (116,28%), serta Indeks Profesionalitas ASN (108,45%).
2. Terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian pada Triwulan II karena memang target pengukurannya direncanakan pada akhir tahun (Nilai Posisi Akhir), seperti penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas, implementasi standardisasi prasarana, penyusunan rencana induk sarana dan prasarana, penyelesaian NSPK, Penilaian Mandiri SAKIP, Pengawasan Kearsipan Internal, Nilai Inovasi, dan Implementasi Budaya Kerja. Kondisi tersebut tidak mencerminkan rendahnya kinerja, melainkan disebabkan oleh karakteristik indikator yang baru dapat diukur setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan pada Semester II.
3. Secara keseluruhan, hasil NKO 108,18% menunjukkan bahwa Direktorat PSP mampu dalam mencapai sasaran strategis Tahun *end of year* 2026. Fokus pada Semester II diarahkan pada penyelesaian indikator-indikator yang



bersifat , sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal dan kinerja organisasi tetap berada pada kategori sangat baik.

4.3. Saran

1. Mempertahankan kinerja pada indikator yang telah melampaui target melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan, pengendalian mutu, dan monitoring berkala agar capaian tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang menjadi dasar pengukuran indikator akhir tahun, antara lain NSPK rencana induk sarana dan prasarana, dan ASKT serta dokumen pendukung SAKIP dan inovasi, sehingga target akhir tahun dapat dicapai sesuai jadwal.
3. Memperkuat koordinasi dengan Eselon I terkait dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar proses penyusunan dokumen, standardisasi, dan implementasi kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian internal melalui penerapan manajemen risiko, tindak lanjut hasil pengawasan, dan dokumentasi capaian kinerja secara berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan akuntabilitas organisasi serta mendukung peningkatan nilai SAKIP Direktorat PSP.

4.4. Rekomendasi

1. Melakukan pengendalian rutin setiap bulan untuk memastikan pencapaian seluruh indikator kinerja dan melakukan *monitoring* evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai target.
2. Menyelesaikan dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen teknis dokumen pendukung indikator akhir tahun (NSPK, ASKT, SAKIP, dan inovasi) sesuai jadwal yang ditetapkan
3. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan, baik di lingkungan Ditjen PSDKP maupun dengan instansi terkait, guna mempercepat proses penyusunan regulasi, pelaksanaan kegiatan, serta penyelesaian dokumen yang menjadi dasar penilaian indikator akhir tahun.
4. Melakukan pemutakhiran manajemen risiko, tindak lanjut pengawasan, dan dokumentasi kinerja secara berkala dengan target 100% rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti.

